PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)

KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR LAMPIRAN iii
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG RKPD TAHUN 2018 vi

BAB I PENDAHULUAN ..... BAB I-1
1.1. Latar Belakang ..... BAB I-1
1.2. Dasar Hukum ..... BAB I-2
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya ..... BAB I-3
1.3.1. Hubungan Dengan RKP Nasional ..... BAB I-3
1.3.2. Hubungan Dengan RKPD Provinsi Lampung ..... BAB I-4
1.3.3. Hubungan Dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 ..... BAB I-4
1.3.4. Hubungan Dengan Renja SKPD ..... BAB II-4
1.3.5. Hubungan Dengan RTRW Kab. Pesawaran Tahun 2011-2031 .. BAB II-4
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD ..... BAB II-4
1.5. Maksud dan Tujuan ..... BAB II-6

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 ..... BAB II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... BAB II-1
2.1.1. Kondisi Geografis. ..... BAB II-1
2.1.2. Penggunaan Lahan ..... BAB II-4
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah ..... BAB II-4
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana ..... BAB II-5
2.1.5. Potensi Unggulan Daerah ..... BAB II-5
2.1.6. Demografi ..... BAB II-9
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan kedua Tahun 2018 ..... BAB II-10
2.2.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD. ..... BAB II-10
2.2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD ..... BAB II-10
2.2.3. Kendala Dalam Pencapaian Kinerja ..... BAB II-10
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... BAB II-20

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... BAB III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... BAB III-1
3.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi ..... BAB III-9
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... BAB III-11
3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... BAB III-12
3.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ..... BAB III-14
3.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ..... BAB III-16
3.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... BAB III-16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... BAB IV-1
4.1. Tema Pembangunan Daerah ..... BAB IV-1
4.1.1. Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 ..... BAB IV-1
4.1.2. RKPD Tahun 2018 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 ..... BAB IV-2
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... BAB IV-5
4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2018 ..... BAB IV-8

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ..... BAB V-1
5.1. Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan

Dan Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2018 ..... BAB V-3
5.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per OPD Tahun 2018 ..... BAB V-4
5.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Kunkuren dan Perangkat Daerah Pelaksana Tahun 2018 ..... BAB V-9

BAB VI PENUTUP ..... BAB VI -1

LAMPIRAN
(TABEL V.4)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18-25
2	Dinas Kesehatan	26-33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34-42
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43-49
5	Dinas Satpol PP	50-52
6	Dinas Sosial	53-56
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi	57-59
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60-63
9	Dinas Ketahanan Pangan	64-65
10	Dinas Lingkungan Hidup	66-69
11	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	70-71
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72-74
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75-80
14	Dinas Perhubungan	81-83
15	Dinas Komunikasi dan Informasi	84-85
16	Dinas Koperasi dan UMKM	86-87
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88-89
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	90-92
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93-95
20	Dinas Perikanan	96-97
21	Dinas Pariwisata	99-101
22	Dinas Pertanian	102-106
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	107-110
24	Sekretariat Daerah Kabupaten	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
a	*Bagian Tata Pemerintahan*	*111*
b	*Bagian Pemerintahan Desa*	*112-113*
c	*Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan*	*114-115*
d	*Bagian Hukum*	*116*
e	*Bagian Bina Potensi*	*117*
f	*Bagian Perekonomian*	*118*
g	*Bagian Pembangunan*	*119-120*
I	*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*121*
J	*Bagian Protokol*	*122*
k	*Bagian Umum*	*123-125*
l	*Bagian Perlengkapan*	*126*
m	*Bagian Organisasi*	*127-128*
25	Sekretariat DPRD	*129-131*
26	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI	*132-133*
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*134-136*
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	*137-138*
29	*Kecamatan Gedong Tataan*	*139-140*
30	*Kecamatan Negeri Katon*	*141-143*
31	*Kecamatan Tegineneng*	*144-146*
32	*Kecamatan Way Lima*	*147-148*
33	*Kecamatan Padang Cermin*	*149-151*
34	*Kecamatan Punduh Pidada*	*152-154*
35	*Kecamatan Kedondong*	*155-157*
36	*Kecamatan Marga Punduh*	*158-160*
37	*Kecamatan Way Khilau*	*161-163*
38	*Kecamatan Teluk Pandan*	*164-166*

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
39	*Kecamatan Way Ratai*	*167-169*
40	Inspektorat	170-172
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	173-178
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	179-184
43	Badan Pendapatan Daerah	185-188
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	189-191
45	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	192-194

BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 35 **TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN 2018

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan 1 (satu) Tahun Anggaran (TA) 2018.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdari dari :

a. Bab I : PENDAHULUAN;
b. Bab II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN;
c. Bab III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
d. Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; DAN
f. Bab VI : PENUTUP

Pasal 3

Pelaksanaan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 ini dituangkan dalam Rencana Operasional tahunan yang memuat program-program dan dilaksanakan dalam Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan-kebijakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Isi beserta perincian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penjabaran tahun pertama dari RPJMD 2016-2021 telah dituangkan ke dalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 dengan mengacu pada ayat (2) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD 2017 tersebut telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2017, setelah sebelumnya melalui proses penyepakatan KUA serta PPAS-APBD 2017 sebagaimana amanat Ayat (1) Pasal 83 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan substansi arahan program dan kegiatan pada RKPD 2017 tersebut secara derivative memberikan acuan teknis pelaksanaan APBD Tahun 2017.

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 sebagai penjabaran tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Pesawaran 2016-2021 telah dituangkan ke dalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 343 bahwa Perubahan

RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA OPD. RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 akan menjadi acuan penyusunan Renja OPD Tahun 2018 Kabupaten Pesawaran.

1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional.

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran. Meskipun RKPD harus

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran.

1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Lampung. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Lampung, RKPD provinsi Lampung harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Wilayah Kabupaten Pesawaran yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Lampung, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota/kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Pesawaran.

1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016- 2021

RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2018 berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 terkait perencanaan di tahun 2018. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan dengan Renja SKPD.

RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2018 menjadi pedoman bagi Renja OPD tahun 2018. Perubahan RKPD menjadi Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Meskipun RKPD menjadi penyusunan Renja OPD, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. RKPD Kabupaten Pesawaran dan Renja Perangkat Daerah ini harus bersesuaian.

1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2018 mengacu kepada RTRW Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2031 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2018 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2018. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pesawaran.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 **Latar Belakang**

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan Perubahn RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018.

1.2 **Dasar Hukum**

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018.

1.3 **Hubungan antar Dokumen**

Menjelaskan tentang hubungan RKPD tahun 2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran.

1.4 **Sistematika Dokumen RKPD**

Memberikan gambaran penyusunan dokumen Perubahn RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5 **Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pesawaran.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

Menjelaskan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Uraian rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD Kabupaten Pesawaran.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian mengenai rancangan perubahan kerangka ekonomi makro daerah, serta arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai perubahan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kabupaten Pesawaran berkaitan dengan Perubahan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Tahun 2018.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tema Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang tema pembangunan yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tahun kedua pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.3 Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang merupakan gambaran prioritas pembangunan RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mencakup Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Pagu Pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Penegasan Perubahan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran.

1.5 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2018 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2018;

4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pesawaran secara geografis terletak diantara 104,92° - 105,34° Bujur Timur (BT) dan 5,12° - 5,84° Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 1.173,77 km² atau 117.377 ha dengan batas administratif adalah :

Sebelah Barat : Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu).

Sebelah Utara : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).

Sebelah Timur : Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung).

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;

Ibukota Kabupaten Pesawaran adalah Gedong Tataan yang merupakan lokasi transmigrasi pertama di Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 117.377 Ha, bila dirinci perkecamatan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Negeri Katon dengan luas 152,69 KM² dan terkecil Kecamatan Way Khilau dengan luas 64,11 KM².

a) Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan lerengnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 0 - 8 % dan > 40 %. Sebagian wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang hampir tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara. Topografi 0-8% terbesar adalah sebesar 13.742,10 yang tersebar di wilayah Kecamatan Negeri Katon. Sedangkan topografi > 40 % terbesar adalah sebesar 9.278 yang tersebar di Kecamatan Padangcermin. Tinggi Permukaan Laut berdasarkan Kecamatan, dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	KECAMATAN	TINGGI DARI PERMUKAAN LAUT (m)
1	2	3
1	Punduh Pedada	199 m (Liohberak)

No	KECAMATAN	TINGGI DARI PERMUKAAN LAUT (m)
1	2	3
2	Marga Punduh	...
3	Padang Cermin	271,5 m (Umbul Lawi)
4	Teluk Pandan	...
5	Way Ratai	...
6	Kedondong	183 m (pg. Kementaro)
7	Way Khilau	...
8	Way Lima	700 m (G. Tangkit Ulu Padang Ratu)
9	Gedong Tataan	142 m (G. Pulau Tangkit)
10	Negeri Katon	95 m (Negeri Katon)
11	Tegineneng	145 m (Tangkit Ulu Buha)

b) Geologi

Secara geologi, di wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa Formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuarter. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuarter muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedongtatan, Kecamatan Way Lima. Di Kecamatan Padangcermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuarter tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pidada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padangcermin di bagian barat dan selatan.

Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan Padangcermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pidada. Sementara formasi lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pidada. Luasan dan sebaran dari masing-masing formasi geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pesawaran disajikan dalam berikut ini.

Untuk kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran berkisar antara 30 – 100 cm. Kondisi ini dasarnya sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian baik lahan basah, lahan kering dan tanaman keras, karena kegiatan pertanian memerlukan kedalaman efektif tanah lebih besar dari 30 cm. Oleh sebab itu, khusus untuk tanaman pangan lahan basah dipersyaratkan pada

kedalamam lebih dari 60 cm, sedangkan tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan/keras cukup sesuai untuk kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm, dan untuk kedalaman tanah kurang dari 30 cm dapat dijadikan lahan konservasi.

Kedalaman efektif tanah > 90 cm, meliputi daerah-daerah lembah, bantaran sungai dan dataran banjir yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Kedalaman efektif tanah antara 30 – 90 cm, meliputi daerah-daerah yang berada disekitar perbukitan (Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh). Kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm meliputi sebagian daerah-daerah perbukitan yaitu Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh.

c) Hidrologi

Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa sungai yang berada di Kecamatan Punduh Pidada, Marga Punduh, Padang Cermin, Way Ratai, Teluk Pandan, Kedondong, Way Khilau, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng. Sungai terpanjang adalah Sungai Way Semah di Kecamatan Gedong Tataan dengan panjang 54 km, dan sungai terpendek adalah sungai Way Kepayang di Kecamatan Kedondong dengan panjang 5 km. Bentukan morfologi, jenis batuan, proses-proses geomorfik serta keadaan tata air yang ada di Kabupaten Pesawaran sangat menentukan pola drainasenya. Daerah pegunungan dan perbukitan yang pada umumnya mempunyai gradient yang cukup besar membentuk pola drainase dendritik, sedang di daerah dimana proses tektonik nyata mempunyai pola drainase rectangular. Daerah volkan dengan bentukan-bentukan kerucut yang masih utuh membentuk pola radial di daerah puncak dan lereng atas, sedang di lereng tengah dan bawah paralel dan sub-paralel.

Dari aspek Hidrologi, Kabupaten Pesawaran dilintasi oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS)Sekampung dan Daerah Aliran Sungai (DAS)Seputih, sehingga menyebabkan Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan, yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian, antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, budidaya perikanan air tawar, sarana penyediaan air bersih, serta sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, baik secara konvensional maupun inkonvesional.

d) Klimatologi

Kabupaten Pesawaran termasuk dalam daerah beriklim tropis, terdiri dari dua musim yaitu musim penghujan dari bulan November s/d April dan musim kemarau dari bulan April s/d Oktober, secara bergantian sepanjang tahun, dengan jumlah hujan rata-rata 152,98 mm/bulan atau jumlah hari hujan rata-rata dalam sebulan adalah 12 hari/bulan. Suhu udara rata – rata minimum berkisar 21,20 ^{0}C, sedangkan suhu udara rata – rata maksimum berkisar 35,26 ^{0}C, dan suhu udara rata-rata 26,69 ^{0}C. Kelembaban udara maksimum sebesar 97,75 %, sedangan kelembaban udara minimum sebesar

45,08 %, dan kelembaban udara rata-rata sebesar 78,06 %, dan tekanan udara rata – rata 1013,36 mlbar. Sedangkan rata – rata kecepatan angin maksimum yang terjadi adalah sebesar 1,89 knot.

2.1.2 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pesawaran terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah, luas untuk lahan sawah sebesar 15.465 Ha atau 13,18 % sedangkan lahan bukan sawah sebesar 101.912 Ha atau 86,82 %. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah tagal/kebun sebesar 28.696 Ha, Perkebunan sebesar 13.376 Ha, dan Kolam/Tebat/Empang sebesar 10.914 Ha. Penggunaan lahan Bukan Pertanian sebesar 30.854 Ha.

Dikaitkan dengan kawasan lindung, Kabupaten Pesawaran memiliki Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 34.536 hektar terdapat di Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Padang Cermin meliputi:

a) Kawasan hutan lindung Pematang Kubuota register 20 dengan luas kurang lebih 7.954,70 hektar;

b) Kawasan hutan lindung Perentian Batu register 21 dengan luas kurang lebih 4.631,76 hektar.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Posisi geografis dan berbagai potensi unggulan juga diyakini menjadi salah satu faktor terbesar dalam berkembangnya perekonomian masyarakat Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan kajian kedudukan wilayah dalam konteks makro (*regional setting*) menunjukkan adanya interaksi baik fisik ekosistem, ekonomi, infrastruktur transportasi, dan sosial kultural, yang mendudukkan Kabupaten Pesawaran sebagai ”hinterland” Pusat Utama Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional).

Dengan kedudukan strategis sebagai ”hinterland” Pusat Utama Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional), ada peluang yang dapat dimanfaatkan bagi perkembangan wilayah Kabupaten Pesawaran ke depan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, diantaranya Rencana Pengembangan Strategis Pulau Sumatera Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (WPS-MBBPT), termasuk Pembangunan Jalan Tol Sumetera yang merupakan bagian WPS-MBBPT, dan mendukung percepatan pembangunan Provinsi Lampung, diantaranya Rencana Pengembangan Wisata Terintegrasi Teluk Lampung, serta Rencana Pengembangan Metropolitan Bandar Lampung.

Dengan kedudukan strategis demikian ini, ada peluang yang dapat dimanfaatkan bagi perkembangan wilayah Kabupaten Pesawaran ke depan, dengan sektor unggulan pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan.

Secara alamiah dan dengan sendirinya Kabupaten Pesawaran sudah terbentuk citra sebagai kota agropolitan yang didukung oleh keadaan alam dan lingkungan wisata yang potensial. Potensi daerah di bidang wisata dan pertanian menjadi komoditi andalan yang kompetitif. Sektor agrowisata atau wisata pertanian merupakan salah satu pilihan untuk dikembangkan di Kabupaten Pesawaran dengan memanfaatkan potensi pertanian dan potensi wisata yang ada. Di samping itu, pariwisata merupakan salah satu potensi Kabupaten Pesawaran selain pertanian. Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan potensi pariwisata karena wilayah ini telah dikenal baik di tingkat regional maupun nasional.

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam meliputi:

Kawasan rawan bencana tsunami meliputi:

a. kawasan pesisir Kecamatan Punduh Pedada dan Marga Punduh dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar; dan

b. kawasan pesisir Kecamatan Padang Cermin, Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.

Kawasan rawan bencana banjir dengan luas kurang lebih 24.954 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.

Kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.

Kawasan rawan bencana tanah longsor berupa kawasan gerakan tanah kerawanan tinggi yang berpotensi terjadi di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima.

2.1.5 Potensi Unggulan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Pesawaran diarahkan pada Percepatan perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Adapun rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

a) Pariwisata

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Air Terjun, ditetapkan pada *Kecamatan Way Ratai*, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Sumber Jaya; Desa Ceringin Asri; Desa Poncorejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; dan Desa Wates Way Ratai. *Kecamatan Padang Cermin*, meliputi : Desa Way Urang; Desa Paya; dan Desa Tambangan.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner Dan Ekonomi Kreatif, ditetapkan pada *Kecamatan Teluk Pandan*, meliputi : Desa Sukajaya Lempasing; Desa Sidodadi; Desa Batumenyan; Desa Hanura; Desa Hurun; Desa Cilimus; Desa Talangmulya; Desa Munca; dan Desa Tanjung Agung. *Kecamatan Padang Cermin*, meliputi : Desa Sanggi; Desa Gebang; dan Desa Durian.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari Dan Warisan Budaya, ditetapkan pada :*Kecamatan Punduh Pidada*, meliputi : Desa Pagar Jaya; Desa Pulau Legundi; dan Desa Sidodadi. *Kecamatan Marga Punduh*, meliputi: Desa Pulau Pahawang; Desa Kekatang; Desa Kampung Baru; Desa Pekon Ampai;Desa Kunyaiyan; Desa Cilimus; dan Desa Tajur. *Kecamatan Teluk Pandan*, meliputi Desa Batumenyan.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Kerajinan Tangan Tapis, ditetapkan pada: Kecamatan Negeri Katon, meliputi : Desa Kagungan Ratu, Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; dan Desa Pujo Rahayu.

b) Pertanian

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Padi, ditetapkan pada: *Kecamatan Marga Punduh*, meliputi : Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. *Kecamatan Punduh Pedada*, meliputi : Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. *Kecamatan Way Lima*, meliputi : Desa Gunung Rejo; Desa Cimanuk; Desa Suka Mandi; Desa Way Harong; Desa Margo Dadi; Desa Tanjung Agung; Desa Kota Dalam; Desa Baturaja; Desa Sindang Garut; Desa Sidodadi; Desa Gedung Dalom; Desa Pekondoh; Desa Pekondoh Gedung; Desa Banjar Negeri; Desa Padang Manis; dan Desa Paguyuban. *Kecamatan Way Khilau,* meliputi : Desa Gunung Sari; Desa Kububatu; Desa Tanjungrejo; Desa Kotajawa; Desa Tanjungkerta; Desa Sukajaya; Desa Padang cermin; Desa Bayas Jaya; Desa Penengahan; dan Desa Madajaya. *Kecamatan Way Ratai*, meliputi : Desa Gunung Rejo; Desa Mulya Sari; Desa Ponco Rejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way Ratai; Desa Ceringin Asri; Desa Bunut Seberang; Desa Sumber Jaya; dan Desa Bunut. *Kecamatan Padang Cermin*,

meliputi : Desa Padang Cermin; Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Gayau; Desa Banjaran; Desa Khepong Jaya; Desa Hanau Bekhak; Desa Tambangan; Desa Paya; Desa Way Urang; dan Desa Tri Mulyo. Kecamatan Gedong Tataan, meliputi : Desa Kurungan Nyawa; Desa Negeri Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman Sari; Desa Wiyono; Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa Gedong Tataan; Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa Cipadang; Desa Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; dan Desa Kutoarjo. *Kecamatan Tegineneng*, meliputi : Desa Kresno Widodo; Desa Gedung Gumanti; Desa Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang Hari Ogan; Desa Rejo Agung; Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates; Desa Gunung Sugih Baru; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; dan Desa Sri Wedari. *Kecamatan Negeri Katon*, meliputi : Desa Purworejo; Desa Kagungan Ratu; Desa Pujo Rahayu; Desa Kali Rejo; Desa Tanjung Rejo; Desa Negeri Katon; Desa Negara Saka; Desa Pejambon; Desa Halangan Ratu; Desa Tresno Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa Sidomulyo; Desa Poncokresno; Desa Trirahayu; Desa Sinar Bandung; Desa Bangun Sari; Desa Karang Rejo; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Pisang;

Kecamatan Marga Punduh, meliputi : Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. *Kecamatan Punduh Pedada*, meliputi : Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. *Kecamatan Way Ratai*, meliputi : Desa Wates Way Ratai; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran Indah; dan Desa Mulya Sari. *Kecamatan Padang Cermin*, meliputi :Desa Banjaran; Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Padang Cermin; dan Desa Hanau Bekhak.

Kawasan Perdesaan Berbasis Cabe;

Kecamatan Marga Punduh, meliputi : Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. *Kecamatan Punduh Pedada*, meliputi : Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. *Kecamatan Way Ratai*, meliputi : Desa Gunung Rejo; Desa Poncorejo; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran Indah; Desa Mulyasari; dan Desa Wates Way Ratai.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Jagung;

Kecamatan Tegineneng, meliputi : Desa Kresno Widodo; Desa Gedung Gumanti; Desa Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang Hari Ogan; Desa Rejo Agung; Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa

Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; dan Desa Sri Wedari. *Kecamatan Negeri Katon*, meliputi : Desa Pujo Rahayu; Desa Tanjung Rejo; Desa Pejambon; Desa Halangan Ratu; Desa Tresno Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa Sidomulyo; Desa Poncokresno; Desa Tri Rahayu; Desa Sinar Bandung; dan Desa Bangun Sari.

c) Peternakan

Kawasan Perdesaan Pengembangan Ternak Kambing.

Kecamatan Way Ratai, yang meliputi : Desa Gunung Rejo; Desa Mulyasari; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way Ratai; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Bunut Seberang; Desa Caringin Asri. *Kecamatan Gedong Tataan*, meliputi :Desa Kurungan Nyawa; Desa Negeri Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman Sari; Desa Wiyono; Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa Gedong Tataan; Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa Cipadang; Desa Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; Desa Kutoarjo; dan Desa Sungai Langka.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Ternak Sapi.

Kecamatan Tegineneng, meliputi : Desa Kresno Widodo; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; Desa Sri Wedari; dan Desa Margo Rejo. *Kecamatan Negeri Katon*, yang meliputi : Desa Tanjung Rejo; Desa Negeri Katon; Desa Pejambon; Desa Tresno Maju; Desa Rowo Rejo; Desa Sido Mulyo; Desa Poncokresno; Desa Karang Rejo; Desa Bangun Sari; Desa Tri Rahayu; dan Desa Sinar Bandung.

d) Perkebunan.

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan **Kakao wilayah I** ditetapkan pada: *Kecamatan Kedondong*, meliputi: Desa Tempel Rejo; Desa Sinar harapan, Desa Harapan Jaya; Desa Babakan Loa; Desa Kedondong; Desa Pesawaran; Desa Teba Jawa; Desa Sukamaju. *Kecamatan Way Khilau* meliputi: Desa Bayas Jaya, Desa Padang Cermin, Sukajaya, Penengahan, Mada Jaya, Tanjung Rejo, Desa Kubu Batu, Desa Kota Jawa, Desa Tanjung Kerta. *Kecamatan Way Lima* meliputi: Desa Padang Manis, Desa Banjar Negri, Desa Way harong, Desa Gunung Rejo, Desa Cimanuk, dan Desa Margodadi.

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan **Kakao wilayah II** ditetapkan pada: *Kecamatan Padang Cermin*, meliputi: Desa Banjaran, Desa Sanggi, Desa Padang Cermin, Desa Durian, Desa Way Urang, *Kecamatan Way Ratai* meliputi :Desa Gunung Rejo, Desa Harapan Jaya, Desa Pesawaran Indah, Desa Sumber Jaya, Desa Bunut Sebrang, Desa Bunut, Desa Paya, Desa Tambangan, Desa Gayau, Desa Wates Way Ratai. *Kecamatan Marga Punduh*, meliputi Desa Penyandingan, Desa Tajur, Desa Umbul limus, Desa Sukajaya Punduh, Pulau Pehawang. *Kecamatan Punduh Pidada*, meliputi: Desa Banding Agung, Desa Kunyaian, Desa Suka Maju,

Desa Bawang, Desa Bangun Rejo, Desa Sukarame, dan Desa Batu Raja.

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan **Kelapa wilayah II** ditetapkan pada *Kecamatan Punduh Pidada* meliputi: Pulau Legundi, Desa Kampung Baru, Desa Sukajaya Punduh, Desa Banding agung.

e) Perikanan

Kawasan Perdesaan Pengembangan Perikanan, ditetapkan pada *Kecamatan Padang Cermin*, meliputi : Desa Durian; Desa Sanggi; dan Desa Gayau. *Kecamatan Teluk Pandan*, meliputi : Desa Gebang; dan Desa Suka Jaya. *Kecamatan Marga Punduh*, meliputi : Desa Tajur; dan Desa Pulau Pahawang. *Kecamatan Punduh Pidada* meliputi : Desa Pulau Legundi; dan Desa Sukarame.

Penetapan kawasan perdesaan berbasis minapolitan, ditetapkan pada: *Kecamatan Padang Cermin*, meliputi : Desa Padang Cermin; dan Desa Durian. *Kecamatan Teluk Pandan*, meliputi : Desa Gebang; Desa Hurun; Desa Hanura; dan Desa Sidodadi. *Kecamatan Punduh Pidada* meliputi :Desa Bangunrejo; Desa Sukarame; Desa Kampung Baru; Desa Kekatang; Desa Kota Jawa; dan Desa Rusaba.

f) Industri

Penetapan kawasan perdesaan **berbasis *home* industri** ditetapkan pada *Kecamatan Gedong Tataan*, meliputi : Desa Kutoarjo; Desa Bagelen; dan Desa Karang Anyar. *Kecamatan Negeri Katon*, meliputi : Desa Kagungan Ratu; Desa Karang Rejo; Desa Purworejo; Desa Pujo Rahayu; dan Desa Kalirejo.

Penetapan kawasan perdesaan **berbasis sentra industri kerajinan tapis**, ditetapkan pada *Kecamatan Negeri Katon*, meliputi : Desa Kagungan Ratu, Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; Desa Negara Saka; Desa Kalirejo; Desa Pejambon; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.

2.1. 6 Demografi

a) Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 436.389 jiwa yang terdiri atas 219.587 jiwa penduduk laki-laki dan 296.802 jiwa penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran tahun 2015 mencapai 363,26 jiwa/km^2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Gedong Tataan dengan kepadatan sebesar 1.469 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Marga Punduh sebesar 106 jiwa/Km^2.

b) Ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Pesawaran Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2015 sebesar 1280 pekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 74,29 persen (951 pekerja). Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki jumlah usaha terbanyak di tahun 2015 yaitu sebesar 78 usaha dengan jumlah tenaga kerja terserap pada lapangan usaha ini sebesar 2803 pekerja.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2018.

Indikator makro pembangunan, memberikan gambaran secara makro terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Upaya pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam membangun daerah diarahkan pada pencapaian visi : “Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur Dan Sejahtera” sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 serta “Pesawaran Sejahtera dan Berdaya Saing Menjadi Bumi Wisata 2025” yang merupakan visi jangka panjang Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025.

Penyusunan Evaluasi Hasil RKPD bersumber dari Laporan Evaluasi Hasil Renja yang disampaikan oleh OPD. Ketepatan waktu dalam menyampaikan dan kebenaran data evaluasi ini sangat berpengaruh dalam mengukur capaian kinerja dan relisasi anggaran, baik dalam evaluasi RKPD maupun RPJMD.

2.2.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

Dari laporan Evaluasi Hasil Renja OPD yang sudah di sampaikan ke Bappeda, setelah di lakukan perhitungan di dapat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 sampai dengan triwulan II adalah sebesar 39,31%, dan rata-rata realisasi anggaran RKPD sebesar 40,32 %.

2.2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

Dari laporan Evaluasi Hasil Renja OPD yang sudah di sampaikan ke Bappeda, setelah di lakukan perhitungan di dapat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pesawaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar 24,77%, dan rata-rata realisasi anggaran RPJMD sebesar 22,02 %.

2.2.3 Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

- ✓ Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kinerjanya masih rendah.
- ✓ Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan.

Tabel.
Evaluasi Capaian Hasil Pembangunan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.00	25.00	28.00	32.00									
		SR	SR	SR	SR									
2	Dinas Kesehatan	48.88	39.76	34.08	24.49		7	0	4	20	6	7	8	9
		SR	SR	SR	SR									
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.56	4.99	0.88	0.07		35							
		SR	SR	SR	SR									
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	49.29	15.76	10.24	1.41		20							
		SR	SR	SR	SR									
5	Satuan Polisi Pamong Praja	25.00	24.77	12.08	33.19									
		SR	SR	SR	SR									

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Dinas Sosial	54.16	54.51	38.95	32.20									
		R	R	SR	SR									
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.29	33.98	7.19	6.96								10	
		SR	SR	SR	SR									
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.22	34.67	27.13	24.14		5			6				
		SR	SR	SR	SR									
9	Dinas Ketahanan Pangan	37.26	37.64	50.00	20.20									
		SR	SR	SR	SR									
10	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	32.99	29.32	41.78	1.30	8								
		SR	SR	SR	SR									
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.00	29.00	19.00	25.00									

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SR	SR	SR	SR									
12	Dinas Lingkungan Hidup	36.23	36.17	33.69	33.84									
		SR	SR	SR	SR									
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	52.00	56.00	29.00	30.74									
		R	R	SR	SR									
14	Dinas Perhubungan	25	34.04	30.03	13.27							9		
		SR	SR	SR	SR									
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	48	43	22.86	22.82						9			
		SR	SR	SR	SR									
16	Dinas Koperasi dan UKM	29.65	57.16	21.13	24.47		4					3		
		SR	R	SR	SR									
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.76	46.59	57.40	51.29	9						2		
		SR	SR	R	R									
18	Dinas Pemuda, dan Olahraga	28.68	38.42	30.46	34.39									

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SR	SR	SR	SR									
19	Dinas Perpustakan dan Kearsipan	41.83	45.24											
		SR	SR	SR	SR									
20	Dinas Perikanan	28.53	47.26	14.58	39.12									
		SR	SR	SR	SR									
21	Dinas Pariwisata	38	52											
		SR	R	SR	SR									
22	Dinas Pertanian	43.52	23.32	24.81	31.49		8							
		SR	SR	SR	SR									
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43.00	45.00	5.00	19.00									
		SR	SR	SR	SR									
24	Bappeda	24.00	20.00	27.00	22.00		7							
		SR	SR	SR	SR									
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.31	52.01	26.74	25.72		8							
		R	R	SR	SR									
26	Badan Pendapatan daerah	57.00	60.16	82.46	25.15									

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		R	R	T	SR									
27	Badan Kepegawaian dan PSDM	36.11	30.89	39.06	32.99		14							
		SR	SR	SR	SR									
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	40.25	32.56	5.43	4.40									
		SR	SR	SR	SR									
29	Inspektorat	39.16	44.87	46.38	43.27	6								
		SR	SR	SR	SR									
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.72	35.67	25.86	27.36	1		1						
		SR	SR	SR	SR									
31	Bagian Tata Pemerintahan	54.17	48.01	9.31	9.99									
		R	SR	SR	SR									
32	Bagian Hukum	73.37	41.04	70.45	33.43									
		S	SR	S	SR									
33	Bagian Kesosmas	32.01	20.59	20.86	12.92									
		SR	SR	SR	SR									
34	Bagian Pemerintahan Desa	30.56	35.52	17.53	19.55									

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SR	SR	SR	SR									
35	Bagian Potensi Daerah	2.38	32.35	27.37	13.31		3							
		SR	SR	SR	SR									
36	Bagian Perekonomian Daerah	72.92	43.73	17.000	16.751					1		2		
		S	SR	SR	SR									
37	Bagian Administrasi Pembangunan	40.00	31.20	5.88	9.61									
		SR	SR	SR	SR									
38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	61.11	59.97	48.33	45.42									
		R	R	SR	SR									
39	Bagian Umum	35.33	37.20	65.07	69.55									
		SR	SR	S	S									
40	Bagian Perlengkapan	77.85	75.14	42.07	36.26									
		T	T	SR	SR									
41	Bagian Protokol	50.04	48.80	26.67	26.01									
		R	SR	SR	SR									
42	Bagian Organisasi	27.86	40.54	36.26	36.26	3								
		SR	SR	SR	SR									
43	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	30.09	32.75	31.63	23.86									

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SR	SR	SR	SR									
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.90	43.78	21.63	34.27	10								
		SR	SR	SR	SR									
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68.57	79.24	18.42	13.45									
		S	T	SR	SR									
46	Kecamatan Gedongtataan	43.33	65.65	22.70	27.42		9							
		SR	S	SR	SR									
47	Kecamatan Tegineneng	43.33	65.65	22.70	27.42									
		SR	S	SR	SR									
48	Kecamatan Negeri Katon	55.34	55.91	8.02	10.71			4						
		R	R	SR	SR									
49	Kecamatan Way Lima													
		SR	SR	SR	SR									
50	Kecamatan Kedondong	21.74	30.90	9.18	7.31									
		SR	SR	SR	SR									

No	PERANGKAT DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Prioritas Nasional								
		K	Rp.	K	Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Kecamtan Padang Cermin	44.07	43.71	17.01	17.58									
		SR	SR	SR	SR									
52	Kecamatan Punduh Pedada	63.79	82.76	12.41	13.63									
		R	T	SR	SR									
53	Kecamatan Way Hilau	32.55	33.74	16.18	17.58									
		SR	SR	SR	SR									
54	Kecamtan Marga Punduh	37.00	32.29	15.00	15.00			4						
		SR	SR	SR	SR									
55	Kecamtan Way Ratai	34.03	47.43	14.17	13.44		6	4						
		SR	SR	SR	SR									
56	Kecamatan Teluk Pandan													
		SR	SR	SR	SR									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SKPD		**39.31**	**40.32**	**24.77**	**22.02**	**37**	**126**	**13**	**4**	**27**	**15**	**23**	**18**	**9**
		SR	SR	SR	SR									

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagian besar telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021. IKU Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam suatu organisasi pemerintah daerah, yang merupakan miniatur dari organisasi pemerintah pusat di daerah, terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja organisasi. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 serta dengan mengakomodasikan keinginan para stakeholder.

Asumsi-asumi makro ekonomi dijadikan dasar upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mencapai sasaran makro hingga akhir tahun 2018 antara lain:

NO	URAIAN	TARGET DAN CAPAIAN RPJMD DAN RKPD/KUA-PPAS					
		RPJMD		RKPD/KUA-PPAS 2017		RKPD/KUA-PPAS 2018	
		2017	2018	TARGET	CAPAIAN	MURNI	PERUBAHAN

NO	URAIAN	TARGET DAN CAPAIAN RPJMD DAN RKPD/KUA-PPAS					
		RPJMD		RKPD/KUA-PPAS 2017		RKPD/KUA-PPAS 2018	
		2017	2018	TARGET	CAPAIAN	MURNI	PERUBAHAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6 ± 1	6 ± 1	6,00	5,07	6,00	5,1-5,3
2	Tingkat Inflasi (%)	4 ± 2	4 ± 2	5,00	3,02	5,00	4 ± 2
3	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	22.99	24.44	22.99	29,83	24.44	31.28
4	Tingkat kemiskinan (%)	16.86	16.36	16.86	17,31	16.36	16,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.50-8.50	6.50-7.50	7,5 0–8,50	5,73	6.50-7.00	5,60
6	Indeks Pembangunan Manusia	63.00-66.00	66.00 - 71.00	63,00	63,47	66.00	65,66
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	103.90	103.95	103.90	107.35	103.95	108,63
8	Tingkat Kemantapan Jalan	75%	90%	75%	80 %	90%	90%

Dengan upaya yang sungguh-sungguh serta trend perekonomian daerah yang makin membaik maka target makro tersebut diperkirakan akan dapat dicapai hingga akhir tahun 2018.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan sampai denga Triwulan II Tahun 2018. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan

perencanaan pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil analisis untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Identifikasi permasalahan pembangunan, dilakukan melalui pendekatan urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

a) Disparitas pendidikan pada setiap jenjang.
b) Kualitas pendidikan yang masih rendah.
c) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana ekstrakurikuler yang dapat menunjang perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan kesehatan peserta didik
d) Fasilitas pendidikan yang belum memadai pada satuan pendidikan
e) Belum sepenuhnya terwujud penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
f) Rendahnya manajemen pendidikan di setiap jenjang pendidikan;
g) Belum optimalnya Capaian Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

2. URUSAN KESEHATAN

a) Belum terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes No.75 Tahun 2014 dan *maldistribusi* SDM;
b) Akses dan mutu pelayanan kesehatan (peningkatan sarana, prasarana, sumber daya manusia)
c) Meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi dan diabetes mellitus)
d) Belum sepenuhnya terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
e) Rendahnya capaian Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka harapan hidup (AHH), dan prevalensi gizi buruk;
f) Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan pelayanan kesehatan;
g) Tingginya angka Penyebaran penyakit endemi baru akibat mutasi penyebab penyakit;

h) Kurangnya Pantauan terhadap penderita Tubercolusis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV)
i) Tingginya angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria;
j) Tingginya Angka penyalahgunaan/penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
k) Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a) Kurangnya kapasitas (daya tampung/daya dukung) jalan ruas/non ruas kabupaten (jalan lingkungan, jalan setapak, dan jalan desa);
b) Kurangnya Jalan Alternatif dan akses penghubung antar kabupaten di wilayah Kabupaten Pesawaran;
c) Rendahnya kualitas dan kuantitas drainase kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
d) Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan;
e) Kurang maksimalnya pengelolaan air baku;
f) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana produksi air baku;
g) Kurangnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi;
h) kurangnya fasilitas Ruang publik (fasilitas pedestrian kota, taman bermain);
i) kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung keindahan kota (taman median, taman perempatan jalan);
j) belum optimalnya Pengendalian pemanfaatan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan RTRW);
k) Belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran tata ruang;
l) Kurang optimalnya pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh;
m) Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a) Kurangnya sarana dan prasarana perumahan layak huni dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
b) Kurangnya penataan lingkungan perumahan;
c) Rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman di Perkotaan dan Perdesaan;
d) Tingginya angka kejadian embrional kawasan kumuh perkotaan;
e) Rendahnya kualitas konstruksi saluran pembuangan akhir limbah rumah tangga (saluran tersier/anak sungai);

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a) Kurangnya kualitas dan personil Penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat.
b) Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
c) Rentan terhadap konflik horisontal;

d) Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah;
e) Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan.
f) Munculnya HOAX, prilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
g) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
h) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dan yang bernuansa SARA.
i) Kualitas SDM dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memamdai;
j) Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana;
k) Kualitas dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal.

6. URUSAN SOSIAL

a) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
b) Tingginya jumlah dan prosentase Penduduk miskin;
c) Kurang optimalnya pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
d) Adanya potensi peningkatan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
e) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai ajaran agama;
f) belum maksimalnya Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan;

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

a) Tingginya Angka pengangguran terbuka, angka pengangguran friksional, dan angka pengangguran struktural;
b) Kurang terbangunnya jiwa kewirausahaan dikalangan pencari kerja;
c) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a) Belum optimalnya peran serta perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
b) Belum optimalnya Pengarusutamaan gender dalam kelembagaan;
c) Belum memadainya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
d) Masih rentan permasalahan *traficking* terhadap perempuan dan anak.
e) Masih sering timbulnya KDRT dan Kekerasaan pada perempuan dan anak.
f) Tingginya Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap prilaku anak-anak dan remaja;

3. URUSAN PANGAN

a) Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat;
b) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan;
c) Kurangnya sosialisasi penganekaragaman makanan;
d) Kurangnya lumbung-lumbung pangan;
e) Tingginya angka penggunaan zat kimiawi yang berbahaya pada pangan segar, pangan siap saji, dan pangan kemasan;
f) Belum optimalnya pembinaan Desa Mandiri Pangan;
g) Belum optimalnya Pendataan Daerah Rawan Pangan;
h) Belum dilakukannya pemutakhiran Peta Kerawanan Pangan secara kontinyu;

4. URUSAN PERTANAHAN

a) Masih rentan permasalahan sengketa lahan;
b) Belum optimalnya sertifikasi Pertanahan;

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara;
b) Kurangnya kesadaran dan keperdulian masyarakat serta pihak swasta terhadap kelestarian lingkungan;
c) Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran lingkungan maupun tindak pidana lingkungan
d) Kurangnya upaya preventif, rehabilitasi, dan rekonstruksi kerusakan lingkungan (mitigasi);
e) Tingginya angka kejadian Bencana alam seperti Banjir, Erosi bantaran sungai, sedimentasi, pedangkalan sungai, puting beliung, dan longsor;
f) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM lingkungan hidup;
g) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan;
h) Tingginya timbulan sampah domestik;
i) Kurang Optimalnya pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah perkotaan;
j) Kurangnya jumlah SDM pengelola persampahan;
k) Kurangnya kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana persampahan.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a) Masih kurangnya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b) belum optimalnya pelaksanaan program E-KTP;
c) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a) Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.
b) Rendahnya Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
c) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;

d) Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;
e) Minimnya penggunaan dan pemanfaatan Iptek Masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
f) Kurangnya kemampuan SDM aparatur desa dalam administrasi perencanaan pembangunan;
g) Rendahnya Kemampuan SDM aparatur desa dalam administrasi pengelolaan keuangan desa.
h) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
i) Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya keluarga berencana menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
b) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

9. URUSAN PERHUBUNGAN

a) Kurangnya penataan Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah ;
b) Belum adanya rencana pengembangan Trayek dan rute angkutan desa, dan angkutan antar kota dalam provinsi;
c) Kurangnya kualitas serta kuantitas prasarana dan fasilitas transportasi darat dan laut;
d) Masih kurangnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
e) Belum optimalnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
a) Belum optimalnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor;

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b) Rendahnya jumlah SDM di bidang TI;
c) Belum optimalnya pemanfaatan website Kabupaten Pesawaran;
d) Adanya arus globalisasi tekhnologi informasi;
e) Belum meratanya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi di wilayah Pesawaran;

11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a) Rendahnya kreatifitas dan inovasi dalam mendukung Usaha.
b) Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM
c) Terbatasnya akses modal untuk pengembangan Koperasi dan UMKM
d) Belum optimalnya Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta;
e) Kurangnya infrastruktur produksi untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM;
f) Pesatnya perkembangan kompetitor koperasi dan UKM;
g) Kurangnya regulasi dalam melindungi dan menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
h) Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal.

i) Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan
j) Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi;

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

a) Pertumbuhan investasi yang belum tumbuh secara progresif, memerlukan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai;
b) Kurang intensifnya Promosi potensi dan Peluang investasi;
c) Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam melengkapi legalitas bangunan dan usaha;
d) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola perizinan.

13. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

a) Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
b) Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda;
c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri
d) Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda;
e) Masih rendahnya kreatifitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan pemuda;
f) Rendahnya pembinaan atlet-atlet daerah;
g) Kurangnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana olahraga;
h) Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional

14. URUSAN STATISTIK

a) Kurangnya akurasi, validasi, dan variasi data statistik;
b) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang statistik.
c) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data statistik;
d) Kurangnya Kajian-kajian dan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;

15. URUSAN PERSANDIAN

a) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam pengiriman informasi yang bersifat rahasia;
b) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam persandian;
c) Masih minimnya Prasarana dan Fasilitas dalam menunjang kegiatan persandian.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

a) Belum optimalnya pembinaan dalam hal pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat istiadat, seni, bahasa, aksara dan sastra, yang bersifat lokal dan nusantara;
b) Kurangnya pendokumentasian dan penggalian budaya daerah;
c) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
d) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;

e) Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
f) Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas.

17. URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

a) Belum optimalinya pengelolaan kearsipan dan perpustakaan daerah;
b) Kurang melembaganya budaya membaca dalam kehidupan masyarakat;
c) Kurangnya SDM arsiparis dan pustakawan;
d) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan serta perpustakan;
e) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Arsip dan Perpustakan;
f) Belum tersedianya Perpustakaan Daerah.

C. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERTANIAN

a) Tingginya angka kejadian alih fungsi lahan (peruntukan dan jenis komoditas);
b) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan;
c) Belum berkembangnya inovasi dan kreatifitas Pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
d) Belum membudayanya diversifikasi pertanian, perkebunan dan peternakan (jenis usaha dan tanaman);
e) Lemahnya penanganan penyakit tanaman dan penyakit ternak;
f) Tingginya persaingan produksi pertanian antar kabupaten dan antar provinsi;
g) Belum optimalnya capaian produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;

2. URUSAN PARIWISATA

a) Belum memiliki *ikon wisata* dan paket destinasi wisata;
b) Pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) belum didukung sarana dan prasarana yang baik;
c) Belum memasyarakatnya program sapta pesona;
d) Ekonomi kreatif belum berkembang.
e) Pemanfaatan hutan sebagai kawasan konservasi masih perlu dioptimalkan sebagai destinasi wisata maupun lokasi observatorium.

3. URUSAN PERIKANAN

a) Rendahnya produksi perikanan air tawar;
b) Rendahnya Keperdulian terhadap budidaya ikan air tawar jenis baru dan jenis ikan yang hampir punah;
c) Rendahnya teknologi Pengolahan hasil perikanan
d) Kurangnya kontrol pemerintah daerah terhadap distribusi hasil perikanan;;
e) Rendahnya Kepedulian Petani ikan terhadap pencemaran akibat industri perikanan;
h) Rendahnya Kualitas dan kuantitas SDM Perikanan;

4. URUSAN PERDAGANGAN

a) Belum optimalnya daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen IPM;
b) Rendahnya daya saing toko tradisional terhadap keberadaan waralaba;
c) Rendahnya daya saing pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern dan toserba;
d) rendahnya kualitas dan kunatitas SDM terhadap pemahaman mekanisme pasar nasional dan global;
e) Rendahnya Daya saing produk daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA);
f) Rendahnya managemen pengelolaan pasar-pasar tradisonal;
g) Rendahnya sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional;
h) Rendahnya keunggulan kompetitif dan kooperatif dalam penguasaan manajemen dan penguasaan pasar-pasar nasional
i) Tingginya tingkat pertumbuhan pasar modern dan waralaba

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

a) Kurang optimalnya kemitraan antara industri besar dan industri kecil (*home industry*);
b) Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.

6. URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

a) Perkembangan jumlah pengguna listrik (masyarakat dan dunia usaha) tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan daya listrik. Ketersediaan listrik yang belum memadai, memerlukan investasi dan pemanfaatan energi alternatif baik dalam skala besar, menengah dan mikro.

7. URUSAN TRANSMIGRASI

a) Kurangnya kesempatan penduduk sebagai calon peserta transmigrasi;
b) Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan transmigrasi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Pesawaran merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Pesawaran, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya. Dengan melihat kondisi yang telah dicapai pada tahun 2017 dan perkembangan yang terjadi serta permasalahan pada tahun 2018 dan sampai dengan triwulan II tahun 2018, akan digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, yaitu untuk menentukan fokus pembangunan ekonomi, identifikasi sektor yang perlu dipercepat perkembangannya. Hal ini akan mengarahkan peran pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan arah kebijakan ekonomi.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2018 disusun berdasarkan pada Kondisi ekonomi makro dan kerangka permasalahan/kendala serta tantangan yang berkembang. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan PDRB.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran, tahun 2017 mengalami laju

pertumbuhan ekonomi walaupun tidak terlalu signifikan. Penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesawaran diantaranya karena peningkatan trafik penggunaan data internet dan perkembangan layanan seluler, listrik sudah mulai dilakukan pengurangan subsidi tahun 2016, serta peningkatan kegiatan konstruksi terutama pembangunan jalan tol sumatera sehingga menyebabkan penggunaan semen meningkat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran Tahun 2013-2016

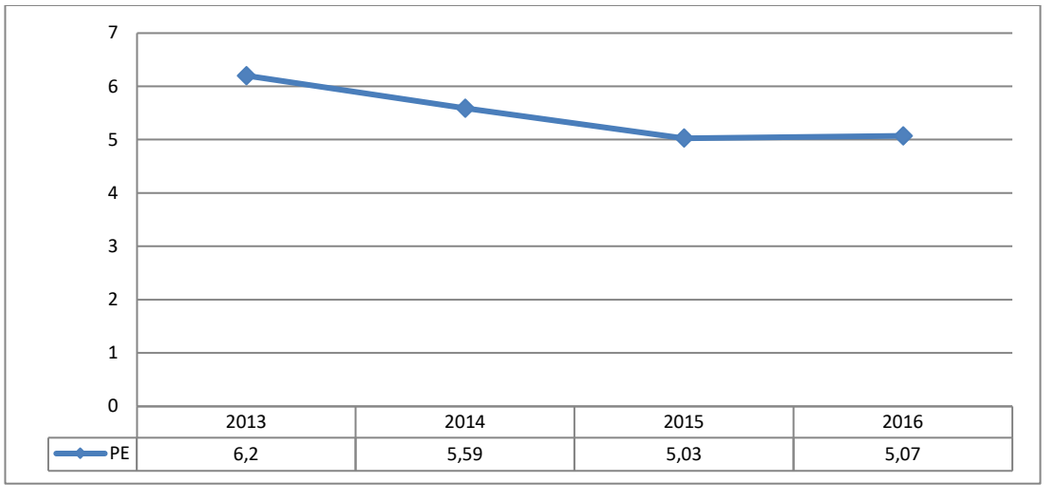

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,37 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 9,26 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi ketiga adalah Konstruksi yaitu sebesar 8,64.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2013-2016

URAIAN KATEGORI	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,07	5,23	4,62	4,92
Pertambangan dan Pengggalian	13,56	7,86	3,80	0,61
Industri Pengolahan	5,82	4,96	6,66	3,80
Pengadaan Listrik dan Gas	10,97	9,08	1,27	9,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi	2,42	5,75	2,98	5,96
Konstruksi	5,94	4,21	1,79	8,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,09	5,98	3,91	3,66
Transportasi dan Perdagangan	7,55	7,43	11,94	8,06

URAIAN KATEGORI	2013	2014	2015	2016
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,25	7,73	11,23	6,00
Informasi dan Komunikasi	8,42	7,96	8,63	9,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,49	5,61	0,68	3,22
Real Estate	9,42	7,04	6,58	5,45
Jasa Perusahaan	13,34	13,20	7,39	2,85
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	5,01	5,87	4,96	4,54
WAJIB				
Jasa Pendidikan	9,38	9,44	7,47	4,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	8,41	7,57	6,19
Jasa Lainnya	4,40	5,26	8,42	3,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**6,20**	**5,59**	**5,03**	**5,07**

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

b) PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Per Kapita Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung (Rp), 2012 – 2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Pesawaran	21.238.338,61	23.221.310,42	25.732.771,16	27.478.459,90	29.825.447,95
Provinsi Lampung	23.910.842,70	25.768.940,64	28.776.867,50	31.195.864,72	34.260.610,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat Kabupaten Pesawaran selama periode 2012-2016 selalu mengalami peningkatan. Meskipun angka perkapita ini bersifat global tanpa melihat nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten Pesawaran, namun

dengan melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran secara umum dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB perkapita Kabupaten Pesawaran tahun 2012 sebesar 21,24 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2013, PDRB per kapita kabupaten Pesawaran bertambah 1,98 juta rupiah menjadi 23,22 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2014, PDRB perkapita Kabupaten Pesawaran menjadi 25,67 juta rupiah. Pada tahun 2015, PDRB perkapita kabupaten Pesawaran bertambah 1,81 juta rupiah menjadi 27,48 juta rupiah. Penambahan PDRB perkapita yang terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,35 juta rupiah menjadi 29,83 juta rupiah.

Peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Pesawaran juga sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita Provinsi Lampung, meskipun nilai PDRB perkapita untuk Kabupaten Pesawaran selama lima tahun terakhir masih berada dibawah angka PDRB perkapita Provinsi Lampung. Pada tahun 2016, PDRB perkapita Provinsi Lampung mencapai 34,26 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,62 persen dibandingkan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 31,20 juta rupiah. Berikut gambaran perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung tahun 2012-2016.

PDRB Per Kapita Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016

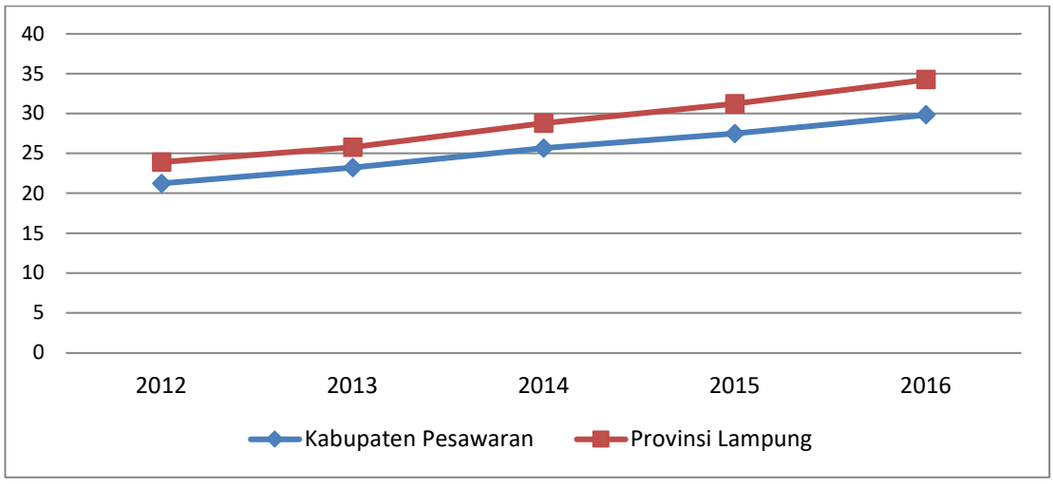

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa PDRB perkapita Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2012-2016, pendapatan perkapita Kabupaten Pesawaran masih berada dibawah pendapatan perkapita Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, rata- rata pendapatan penduduk Pesawaran masih berada dibawah rata-rata Provinsi Lampung. Akan tetapi perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, dengan segala keterbatasan indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dan tolak ukur kemakmuran suatu daerah.

c) PDRB Menurut Pengeluaran

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 s.d 2016, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal, banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Secara total, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku (adhb) di tahun 2016 meningkat sebesar 9,76%, yakni dari 11.716 miliar Rupiah menjadi 12.861 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatan ini lebih kecil, yakni dari 9.368 miliar Rupiah menjadi 9.843 miliar Rupiah, atau meningkat sebesar 5,07%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Pesawaran periode 2012 - 2016 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,87%; 6,20%; 5,59%; 5,03%; dan 5,07%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Jika dilihat dari permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode 2012 – 2016, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku meningkat cukup pesat, yakni sebesar 8.730 miliar Rupiah (2012); 9.669 miliar Rupiah (2013); 10.818 miliar Rupiah (2014); 11.716 miliar Rupiah (2015); dan 12.861 miliar Rupiah (2016). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Pesawaran pada periode 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), Kabupaten Pesawaran, 2012-2016

URAIAN KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	5.219	5.686	6.262	6.853	7.545
Konsumsi LNPRT	87	98	111	129	147
Komsumsi Pemerintah	641	709	797	896	956
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.637	2.813	3.081	3.429	3.859
Perubahan Inventori	133	198	4	3	6
Ekspor	1.932	2.371	2.855	2.819	2.837
Impor	1.918	2.206	2.292	2.413	2.488
PDRB	**8.731**	**9.669**	**10.818**	**11.717**	**12.861**

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat

dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya, terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pesawaran pada periode 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), Kabupaten Pesawaran, 2012-2016

URAIAN KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	4.552	4.780	5.061	5.365	5.609
Konsumsi LNPRT	80	83	87	95	101
Komsumsi Pemerintah	537	567	585	639	662
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.362	2.444	2.587	2.717	2.918
Perubahan Inventori	98	44	1	1	2
Ekspor	1.885	2.001	2.091	2.059	2.066
Impor	1.560	1.471	1.493	1.508	1.514
PDRB	**7.954**	**8.448**	**8.920**	**9.369**	**9.843**

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Pesawaran meningkat, yakni sebesar 7.954 miliar Rupiah (2012); 8.448 miliar Rupiah (2013); 8.920 miliar Rupiah (2014); 9.369 miliar Rupiah (2015); dan 9.843 miliar Rupiah (2016), dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran cenderung melambat, yakni dari 5,87 persen pada tahun 2012 menjadi 5,07 persen pada tahun 2016.

Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016

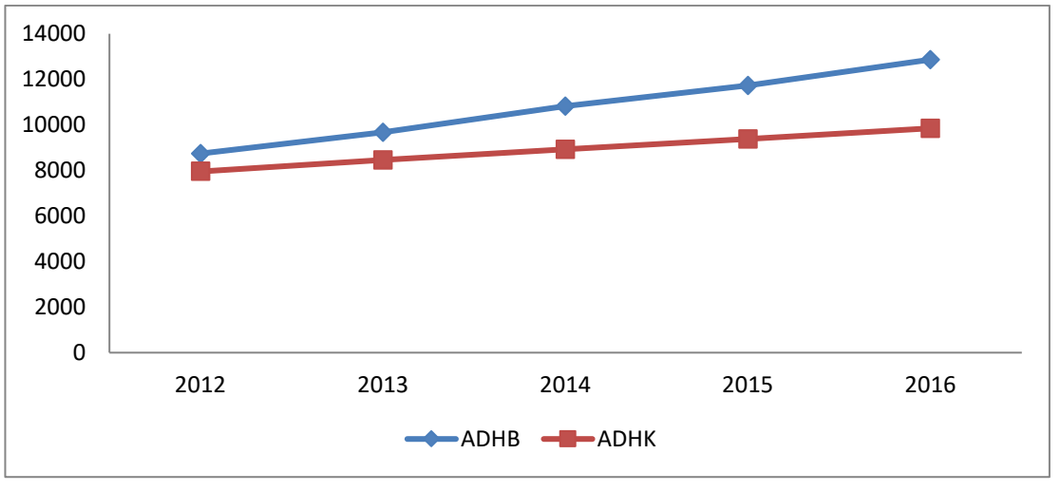

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Dari Gambar diatas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012-2016

URAIAN KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	59,78	58,81	57,89	58,49	58,66
Konsumsi LNPRT	1,00	1,02	1,02	1,10	1,14
Komsumsi Pemerintah	7,34	7,33	7,37	7,65	7,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,21	29,10	28,48	29,27	30,00
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor	22,12	24,54	26,39	24,06	22,06
Impor	21,97	22,82	21,19	20,60	19,35
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2012-2016, PDRB Kabupaten Pesawaran, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 28,48 s.d 30,21 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 22,06 s.d 26,39 persen, tetapi, di sisi lain, komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 19,35 s.d 22,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, (persen) Kabupaten Pesawaran 2012-2016

URAIAN KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	5,31	5,01	5,88	6,01	4,54
Konsumsi LNPRT	5,55	4,06	4,24	9,57	6,03
Komsumsi Pemerintah	5,23	5,51	3,20	9,20	3,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,88	3,49	5,86	5,00	7,39
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor	21,86	6,11	4,53	-1,54	0,31
Impor	26,12	-5,71	1,48	1,01	0,36
PDRB	**5,87**	**6,20**	**5,59**	**5,03**	**5,07**

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2012 – 2016, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016

URAIAN KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	114,65	118,94	123,73	127,73	134,50
Konsumsi LNPRT	108,60	117,89	127,50	136,00	145,30
Komsumsi Pemerintah	119,28	125,05	136,25	140,30	144,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	111,67	115,10	119,08	126,23	132,25
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor	102,45	118,51	136,50	136,88	137,35
Impor	122,93	149,95	153,51	160,02	164,37
PDRB	**109,76**	**114,45**	**121,28**	**125,06**	**130,65**

Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017.

3.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2018

Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 merupakan bagian dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional, sehingga dalam penyusunannya, keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah tetap menjadi perhatian utama. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR tentang asumsi ekonomi makro dalam APBN 2018, ditetapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 adalah sebesar 5,4 persen, dengan tingkat inflasi nasional sekitar 3,5 persen.

Pemerintah (bersama BI dan OJK) telah menggelontorkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang dimulai pada akhir 2017 hingga awal 2018, kesemuanya ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain dengan menjamin pasokan, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan pangan, mendorong tumbuhnya investasi, dan bergeraknya ekonomi riil; secara bertahap diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum di tahun 2018.

Pembangunan dan Investasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk dalam hal pengadaan tanah dan penyertaan modal pada BUMN bidang infrastruktur agar produktivitas pangan dan konektivitas dapat memperkuat sisi penawaran dan distribusi serta mengurangi pengangguran.

Secara keseluruhan harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan memberikan kontribusi pada level yang moderat dalam perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2018.

Optimisme penyerapan anggaran pemerintah pusat dengan distribusi antarperiode yang lebih proporsional yang lebih baik di tahun 2018 diperkirakan mampu menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak dalam negeri tahun 2018. Pajak Penghasilan (PPh) masih memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak dalam negeri, sehingga peran PPh diharapkan semakin meningkat di tahun 2018 sejalan dengan peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2018, berdasarkan Pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan stimulus APBD Kabupaten Pesawaran kepada sektor riil melalui belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung diharapkan mampu menggerakkan semua sektor produksi, terutama pertanian dan perdagangan/pariwisata.

Berdasarkan prediksi PDRB, diperkirakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Pesawaran dalam tahun 2018 tetap dijaga meskipun dimungkinkan terjadinya perlambatan terkait dengan gejolak ketidakpastian ekonomi nasional, kenaikan harga dan regulasi BBM, dan tingkat inflasi. Perkembangan diharapkan terjadi dengan jumlah barang dan jasa yang secara fisik dihasilkan bertambah besar dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Pertumbuhan yang stagnan pada

tahun 2016 dan sedikit melambat pada tahun 2017 (meskipun tetap tinggi) diharapkan mampu menumbuhkan sektor modern seperti perdagangan, akomodasi, pariwisata, jasa dan agrobisnis namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor-sektor dimana orang miskin bekerja.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah (6 ± 1) persen. Pertumbuhan optimis yang dapat tercapai dan diperkirakan mencapai > 6,0%, mengingat kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional masih cukup fluktuatif dan masih mengadung ketidakpastian.

Prospek pertumbuhan ekonomi daerah selama sisa tahun 2018 diperkirakan akan membaik, namun risiko ke bawah masih ada. Sumber perbaikan ekonomi terutama akan datang dari kinerja pengeluaran pemerintah yang membaik, termasuk dalam bentuk proyek infrastruktur di berbagai daerah. Meskipun demikian, perekonomian daerah masih menghadapi risiko ke bawah yang bersumber dari tingginya ketidakpastian perekonomian global yang dapat berdampak pada melemahnya permintaan ekspor dan menurunnya harga komoditas dunia. Dari sisi domestik, risiko perlambatan ekonomi bersumber dari kemungkinan terhambatnya implementasi pembangunan infrastruktur. Hal demikian, di tengah harga komoditas yang masih rendah, dapat berdampak negatif terhadap kinerja konsumsi melalui penurunan daya beli. Lambatnya pemulihan ekonomi global akan menekan kinerja ekspor manufaktur. Hal ini, di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan faktor input, dapat mengurangi minat investasi swasta.

Dari sisi pengendalian harga, masih terdapat sejumlah risiko yang dapat menghambat tren penurunan inflasi yang saat ini berlangsung**.** Risiko kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar dan dampaknya terhadap harga komoditas energi (BBM, listrik, LPG) menjadi faktor risiko inflasi yang paling mengemuka di seluruh wilayah. Kedua faktor tersebut perlu terus dicermati, terutama dalam upaya meredam dampak lanjutannya (*second round impact*) terhadap harga barang dan jasa yang lain. Selain faktor risiko jangka pendek tersebut, pengendalian laju inflasi di berbagai daerah juga masih dihadapkan pada tantangan struktural, terutama yang terkait dengan keterbatasan pasokan/produksi pangan dan tata niaga pangan yang tidak efisien.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Pesawaran serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka diperkirakan perekonomian Kabupaten Pesawaran masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1) Menyediakan infrastruktur yang Mantap dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.

2) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
3) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
4) Meningkatkan daya saing ekspor khususnya untuk produk agrobisnis, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, mampu menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan;

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah.

Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Apabila melihat dari tahun ke tahun pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran selalu mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok dana perimbangan juga menunjukkan peningkatan hal ini berkaitan dengan berlakukanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya. Adapun urusan yang mengalami perubahan antara lain Urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang beralih ke Pemerintah Provinsi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan pada DAK terdapat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non Fisik.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, maka daerah harus segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh

pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pesawaran yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama,** sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri. **Kedua,** sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pesawaran diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Pesawaran selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pesawaran.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dilakukan melalui kajian hasil perkiraan minimal yang diperinci oleh Dinas terkait di Kabupaten Pesawaran. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu adalah menyusun proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan data empiris. Selanjutnya hasil proyeksi tersebut dievaluasi sebagai bahan menentukan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen pendapatan daerah yang relatif lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, bila dibandingkan dengan dua komponen lainnya

Dalam menentukan perkiraan PAD asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10. Skenario yang dipilih dalam menentukan perkiraan pendapatan daerah adalah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,71%, dan inflasi 4 ± 2 %. Alasan memilih asumsi tersebut adalah karena besaran-besarannya wajar, dan dekat dengan skenario nasional dan Provinsi Lampung yang dibuat untuk kepentingan APBN dan APBD. Di samping asumsi kondisi ekonomi makro tahun 2018, proyeksi PAD didasarkan pada asumsi anggaran bahwa sisa perhitungan anggaran tahun lalu, diupayakan semakin membaik.

3.3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 08 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2017 Perihal penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam pelaksanaannya dilakukan perubahan-perubahan sebagai berikut:

Pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.1.312.263.087.386,00 berubah menjadi Rp.1.347.940.407.000,00 atau naik sebesar Rp.35.677.319.614,00 atau naik sebesar 2,72%. Pendapatan tersebut berasal dari: (a) Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah; (b) dana perimbangan yang besumber dari dana bagi hasil pajak, Dana bagi hasil sumberdaya alam; dan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018 diperkirakan sebesar Rp.59.844.283.386,00 yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp.19.396.650.000,00; Retribusi daerah sebesar Rp.3.829.450.000,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.550.000.000,00; serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.36.068.183.386,00.

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan, diperkirakan menjadi Rp.73.742.111.000,00 atau bertambah sebesar Rp.13.897.827.614,00 (23,22%) yang disebabkan Proyeksi terhadap Hasil Pajak daerah bertambah menjadi Rp.24.310.700.000,00 atau bertambah sebesar Rp.4.914.050.000,00 (25,33%) yang berasal dari Proyeksi Penambahan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Granit/Andesit, dan BPHTB;

Hasil Retribusi Daerah bertambah menjadi Rp.4.229.450.000,00 atau bertambah sebesar Rp.400.000.000,00 (10,45%) yang berasal dari Proyeksi Penambahan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar-Kios, Retribusi Pengendaliaan Menara-Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi ;

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bertambah menjadi Rp.44.651.961.000,00 atau bertambah sebesar Rp.8.583.777.614,00 (23,80%) yang berasal dari Pendapatan dari Pengembalian lainnya;

sedangkan pada sisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.550.000.000,00.

Tabel. Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**59,844,283,386.00**	**73,742,111,000.00**	**13,897,827,614.00**	**23.22%**
4.1.1	*Pendapatan Pajak Daerah*	19,396,650,000.00	*24,310,700,000.00*	*4,914,050,000.00*	25.33%
4.1.2	*Hasil Retribusi daerah*	3,829,450,000.00	4,229,450,000.00	*400,000,000.00*	10.45%

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
4.1.3	*Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan*	550,000,000.00	550,000,000.00	*0.00*	0.00%
4.1.4	*Lain-lain PAD yang sah*	36,068,183,386.00	44,651,961,000.00	*8,583,777,614.00*	23.80%

(b) Dana Perimbangan.

Dana perimbangan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018 sebesar Rp.950.990.396.000,00 berasal dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar Rp.26.040.018.000,00; Dana Alokasi Umum sebesar Rp.669.276.831.000,00; dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.255.673.547.000,00.

Dalam pelaksanaannya, target pendapatan Dana Perimbangan tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.951.457.816.000,00 atau bertambah sebesar Rp.467.420.000,00 (0,05%), Proyeksi yang mengalami perubahan diantaranya Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penambahan menjadi Rp.26.507.438.000,00 atau bertambah sebesar Rp.467.420.000,00 (1,80%) yang berasal dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami perubahan.

Tabel. Proyeksi Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2018

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
4.2	**Dana Perimbangan**	**950,990,396,000.00**	**951,457,816,000.00**	**467,420,000.00**	**0.05%**
4.2.1	*Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak*	26,040,018,000.00	*26,507,438,000.00*	*467,420,000.00*	1.80%
4.2.2	*Dana Alokasi Umum*	669,276,831,000.00	669,276,831,000.00	*0.00*	0.00%
4.2.3	*Dana Alokasi Khusus*	255,673,547,000.00	255,673,547,000.00	*0.00*	0.00%

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018 sebesar Rp.301.428.408.000,00 berasal dari Dana Hibah sebesar Rp. 48.804.800.000,00; Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya sebesar Rp.83.141.430.000,00 serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.169.482.178.000,00.

Dalam pelaksanaannya, target lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.322.740.480.000,00 atau bertambah sebesar Rp.21.312.072.000,00 (7,07%) yang bersumber dari adanya penambahan dari sisi Pendapatan Hibah menjadi Rp.55.446.262.000,00 atau bertambah sebesar Rp.6.641.462.000,00 yang berasal dari Dana Hibah Daerah untuk Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-591/MK.7.2017 Tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Pesawaran; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya berubah menjadi Rp.99.158.530.000,00 atau bertambah sebesar

Rp.16.017.100.000,00 (19,26%) yang berasal dari Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, serta Bagi Hasil Pajak Rokok;

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berubah menjadi Rp.168.135.688.000,00 atau berkurang sebesar Rp.1.346.490.000,00 (-0,79%) yang berasal dari Dana Desa.

Tabel. Proyeksi Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
5.3	**Lain-lain Pendapatan daerah yang sah**	**301,428,408,000.00**	**322,740,480,000.00**	**21,312,072,000.00**	**7.07%**
5.3.1	*Dana Hibah*	48,804,800,000.00	55,446,262,000.00	6,641,462,000.00	13.61%
5.3.2	*Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya*	83,141,430,000.00	*99,158,530,000.00*	16,017,100,000.00	19.26%
5.3.3	*Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus*	169,482,178,000.00	168,135,688,000.00	-1,346,490,000.00	-0.79%

3.3.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah tahun 2018 disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 akan dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang merupakan kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang dan pendukung pemerintahan.

Belanja daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018 diperkirakan sebesar Rp.1.369.538.605.020,65 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.669.938.597.572,65 meliputi belanja pegawai, belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. dan Belanja tidak langsung sebesar Rp.699.600.007.448,00 merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai; belanja hibah; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; serta belanja tidak terduga.

Dalam pelaksanaanya terdapat perubahan Belanja Daerah menjadi sebesar Rp.1.405.053.462.886,91 atau bertambah sebesar Rp.35.514.857.866,26 (2,59%). Perubahan ini berasal dari Perubahan Belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung.

Pada Pos Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan menjadi Rp.691.843.275.704,91 atau berkurang sebesar Rp.7.756.731.743,09 (-1,11%).

Pada Pos Belanja Langsung juga mengalami perubahan menjadi Rp.713.210.187.182,00 atau bertambah sebesar Rp.43.271.589.609,35 (6,46%).

Tabel. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
5	**BELANJA**	**1,369,538,605,020.65**	**1,405,053,462,886.91**	**35,514,857,866.26**	**2.59%**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**699,600,007,448.00**	**691,843,275,704.91**	**(7,756,731,743.09)**	**-1.11%**
5.1.1	*Belanja Pegawai*	467,783,298,548.00	*458,897,883,000.00*	*(8,885,415,548.00)*	-1.90%
5.1.2	*Belanja Hibah*	18,080,236,000.00	*19,080,236,000.00*	*1,000,000,000.00*	5.53%
5.1.3	*Belanja Bantuan Sosial*	0.00	0.00	-	
5.1.4	*Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	2,322,610,000.00	*2,854,015,000.00*	*531,405,000.00*	22.88%
5.1.5	*Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik*	209,413,862,900.00	209,011,136,900.00	*(402,726,000.00)*	-0.19%
5.1.6	*Belanja Tidak Terduga*	2,000,000,000.00	2,000,004,804.91	*4,804.91*	0.00%
5.2	**Belanja Langsung**	**669,938,597,572.65**	**713,210,187,182.00**	***43,271,589,609.35***	**6.46%**
5.2.1	*Belanja Pegawai*	85,876,039,700.00	88,812,078,450.00	2,936,038,750.00	3.42%
5.2.2	*Belanja Barang dan Jasa*	253,982,168,627.65	261,225,961,863.00	7,243,793,235.35	2.85%
5.2.3	*Belanja Modal*	330,080,389,245.00	363,172,146,869.00	33,091,757,624.00	10.03%

3.3.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pos penerimaan pembiayaan APBD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018 bersumber dari pos sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp.58.775.517.634,65 Sedangkan pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.1.500.000.000.00.

Dalam pelaksanaanya terdapat perubahan Pembiayaan Daerah yaitu dari pos sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan menjadi Rp.59.613.055.886,91 atau bertambah sebesar Rp.837.538.252,26 (1,42%) sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penambahan menjadi Rp.2.500.000.000,00 atau sebesar Rp.1.000.000.000,00. (66,67%).

Tabel. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2018

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
6	**PEMBIAYAAN**	**57,275,517,634.65**	**57,113,055,886.91**	**(162,461,747.74)**	**-0.28%**
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**58,775,517,634.65**	**59,613,055,886.91**	**837,538,252.26**	**1.42%**
6.1.1	*Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya*	58,775,517,634.65	59,613,055,886.91	837,538,252.26	1.42%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**1,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**66.67%**
6.2.1	*Penyerahan Modal (investasi) Pemerintah Daerah*	1,500,000,000.00	*2,500,000,000.00*	*1,000,000,000.00*	66.67%

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tema Pembangunan Daerah

4.1.1 Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

Tema pembangunan daerah Tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 adalah bagian dari tahapan lima tahun kedua (2016-2021) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan lima tahun kedua (2016-2021) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan urusan unggulan serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan kedua melalui Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 yang inline dengan tahapan pembangunan kedua yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Didalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 masuk dalam tahapan pembangunan kedua yang secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 Posisi RKPD Tahun 2018 dalam tahapan RPJMD 2016-2021

Secara substansial dalam konteks perencanaan jangka panjang dan

jangka menengah Kabupaten Pesawaran indikasi tema pembangunan Tahun 2018 yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, adalah :

"Mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten Dan Percepatan Pembangunan Perdesaan Untuk Mendorong Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas"

Dengan delapan unsur utama dalam tema tersebut adalah (1) Peningkatan *ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah* dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat; (2) Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat terutama *pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran*, (3) Percepatan *Pembangunan Perdesaan* dengan Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri, (4) Peningkatan *Tata Kelola Pemerintahan* yang baik (*good governance*), (5) Daya saing dengan memperkuat *sektor pertanian dan pariwisata*, (6) Optimalisasi *Sumber Daya Alam* melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat; (7) Daya tahan ekonomi melalui perkuatan *Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)*, (8) Perwujudan *Sumber Daya Manusia* yang Unggul dan Berdaya Kreatif.

Tema pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan tahun 2018 yang berpedoman pada prioriotas RPJPD tahun 2005-2025 tahap pembangunan ke 2 dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021 dengan memperhatikan keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

4.1.2 RKPD Tahun 2018 sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan nasional disusun pula misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, visi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung adalah Lampung Maju dan Sejahtera, dengan lima misi utama pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama;
4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi maupun kabupaten yang dalam hal ini adalah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Pada proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kabupaten Pesawaran menginternalisasikan tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, serta agenda pembangunan nasional, provinsi maupun agenda pembangunan bidang sektoral.

Di dalam konteks keselarasan antara Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 maupun visi misi rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Lampung, tema RKPD Tahun 2018 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sejalan dengan visi dan misi jangka menengah nasional 2015-2019 maupun misi jangka menengah daerah provinsi Lampung, dimana antara visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2018 dengan misi jangka menengah nasional dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

(1) Peningkatan *ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah* dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang dan usaha untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan usaha mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

(2) Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat terutama *pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran* sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

(3) Percepatan *Pembangunan Perdesaan* dengan Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri sejalan dengan Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

(4) Peningkatan *Tata Kelola Pemerintahan* yang baik (*good governance*) sejalan dengan Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demorkatis, dan terpercaya.

(5) Daya saing dengan memperkuat *sektor pertanian dan pariwisata*, sejalan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis agrobisnis dan agroindustri, dan usaha mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

(6) Optimalisasi *Sumber Daya Alam* melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat sejalan dengan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

(7) Daya tahan ekonomi melalui perkuatan *Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)* sejalan dengan usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sejalan dengan misi nasional dalam upaya mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;

(8) Perwujudan *Sumber Daya Manusia* yang Unggul dan Berdaya Kreatif, sejalan dengan Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2018 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Hubungan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021

VISI : Bersama Masyarakat Pesawaran mewujudkan cita-cita luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan melayani.	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Akuntabel.	Meningkatnya kapasitas, kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta proporsionalisme dan profesionalisme aparatur pemerintahan
	Merealisasikan pembangunan politik	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kualitas kehidupan demokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, perbedaan, keadilan dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif.
		Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi legislator
2. Mewujudkan Infrastruktur Mantap dan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan	Meningkatnya ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN
Berkualitas.	Infrastruktur dasar sebagai akses pencapaian pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Meningkatnya pembangunan dan kualitas Jalan/Jembatan, khususnya yang menjadi kewenangan Kabupaten
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Wilayah, Sumber Daya Air, Air Minum, Sanitasi dan Lingkungan.
		Meningkatnya pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR
		Tertatanya sistem transportasi daerah
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani.	Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemberdayaan sosial
4. Mewujudkan Pendidikan yang Terjangkau, Berkualitas, dan Bermartabat	Meningkatkan aksesbilitas, efektifitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan di semua jenjang Pendidikan
		Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau
		Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan
5. Mewujudkan Petani yang Makmur dan Sejahtera berbasis Agribisnis	Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani	Meningkatnya nilai laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian
		Terwujudnya kedaulatan pangan
		Meningkatnya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani.
		Tersedianya fasilitas permodalan, pemasaran dan kebutuhan penunjang kegiatan budi daya pertanian.
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan potensi daerah dan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Unggul dan Kreatif serta Memperkuat Perekonomian Daerah	prasarana, fasilitas permodalan, dan iklim investasi dalam mewujudkan lapangan kerja masyarakat	pelayanan masyarakat
		Terciptanya sarana prasarana dalam mengembangkan keunggulan dan kreatifitas.
		Tersedianya fasilitas permodalan sebagai pendukung pengembangan usaha dan kreatifitas.
		Meningkatnya investasi daerah
		Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat
7. Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Mewujudkan Keseimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan Pembangunan.	Terwujudnya Tata Ruang Wilayah
		Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
		Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan
	Meningkatkan Destinasi Wisata Unggulan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai destinasi wisata unggulan.
		Terwujudnya pelestarian nilai budaya lokal dalam pengembangan sumber daya alam
8. Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri	Memperkuat pemerintahan desa	Terwujudnya Pemerintah Desa yang Tangguh
	Memberdayakan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Penentuan prioritas program pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2018, mengacu pada;

1. Arah pembangunan tahap kedua RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, yaitu diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan tahap sebelumnya yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

   a. Meningkatkan perekonomian daerah;
   b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal;
   c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
   d. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat;
   e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
   f. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
   g. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur
   h. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum
   i. Terwujudnya masyarakat yang religious
   j. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya
   k. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.
   l. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan.
   m. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dengan kebijakan
   n. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah
   o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   p. Pembangunan politik local
   q. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam
   r. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021;

3. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran, antara lain :

1) Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pergeseran struktur masyarakat dari agraris menuju masyarakat jasa, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non produktif untuk pertanian perlu mendapatkan perhatian dan pengendalian untuk menjamin ketahanan dan keamanan pangan, ketersediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan serta mempertahankan keseimbangan ekologis. Untuk itu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dan Review Peraturan Daerah tentang Tata Ruang (RTRW) yang saat ini sedang disusun untuk dapat segera dituntaskan dan dalam implementasi di tahun 2018 mendapat dukungan dari OPD teknis yang membidangi secara terpadu.
2) Pembangunan pariwisata untuk mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai daerah tujuan wisata pada prinsipnya agar dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dalam payung hukum Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPDA). Untuk itu perlu dilaksanakan upaya pengembangan industri pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan aspek fisik, sosial ekonomi dan budaya dengan menggali semua potensi yang ada dalam kemasan industri pariwisata yang inovatif dan kreatif;
3) Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pendidikan tidak terbatas pada upaya mewujudkan pendidikan murah dan menjangkau seluruh wilayah, namun mulai dipikirkan untuk memberikan pendidikan berkualitas yang memadukan unsur intelektual, ketrampilan dan penerapan nilai-nilai budi pekerti, etika dan pengenalan potensi daerah sejak dini untuk mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai kota vokasi unggulan;
4) Di bidang kesehatan masih dibutuhkan koordinasi lintas sektoral dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi BPJS Kesehatan. Dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan layanan kesehatan sekaligus keterjangkauan layanan kesehatan maka perbaikan infrastruktur di bidang kesehatan maupun optimalisasi pelayanan kesehatan tingkat desa yang jauh dari pusat pemerintahan perlu dilaksanakan;
5) Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ditindaklanjuti dengan Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini hendaknya tidak menyurutkan langkah aparatur pemerintah daerah peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dalam mencapai target kinerjanya guna mewujudkan sekaligus sebagai penggerak pembangunan di daerah. Semua ini dapat diwujudkan melalui upaya reformasi diri dengan ethos dan produktivitas yang tinggi;

6) Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dibutuhkan penguatan di tingkat desa yang meliputi kelembagaan, sumber daya dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran aktif SKPD yang membidangi dalam pelaksanaan Undang-Undang ini sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya melalui perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan yang tepat;

7) dan yang tak kalah penting adalah menciptakan toleransi dalam kehidupan beragama dan mendorong peran umat beragama dalam pembangunan mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang aman, nyaman dan tertib.

4. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Lampung dan Pusat;
5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun 2017;
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Agenda pembangunan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. Agenda prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Pesawaran meliputi beberapa pendekatan prioritas, yaitu :

1. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Bencana, dalam rangka pemantapan dan peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan) dan pengembangan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dalam upaya dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfataan tata ruang melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang;

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Mental diarahkan untuk meningkatkan kualitas dalam rangka mewujudkan daya saing pendidikan menuju Kabupaten Pesawaran sebagai kota vokasional unggulan, sedangkan pelayanan dasar di bidang kesehatan diarahkan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan mental;
3. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta Percepatan Pembangunan Perdesaan menuju Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan desa demi terwujudnya koordinasi dan sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan pengarusutamaan koperasi dan UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran, serta untuk memantapkan Kabupaten Pesawaran sebagai destinasi wisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, Pengembangan Dunia usaha dan Pariwisata dapat dilakukan melalui upaya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.
5. Peningkatan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan guna mewujudkan pemantapan pengembangan dan diversifikasi produk pertanian sejalan dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Tabel 4.2 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran dengan Pembangunan Provinsi Lampung dan Pembangunan Nasional

DIMENSI PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2018	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PESAWARAN 2018
PEMBANGUNAN MANUSIA	PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MENTAL	PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBINAAN MENTAL
	KESEHATAN	KESEHATAN	
	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN	PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA	PERTANIAN DAN KELAUTAN	PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
	KETAHANAN ENERGI	INVESTASI DAN PARIWISATA	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	KETAHANAN PANGAN	INDUSTRI, KOPERASI, DAN UMKM	
	KEMARITIMAN		
PEMERATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS	INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS		
	PEMBANGUNAN WILAYAH		DESA TANGGUH DAN MANDIRI
REFORMASI BIROKRASI	POLITIK, HUKUM DAN PERTAHANAN KEAMANAN (TERMASUK REFORMASI BIROKRASI)	KAMTIBMAS DAN REFORMASI BIROKRASI	TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Prioritas sasaran pembangunan di Kabupaten Pesawaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun berdasarkan sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatnya pembangunan dan kualitas Jalan/Jembatan, khususnya yang menjadi kewenangan Kabupaten
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Wilayah, Sumber Daya Air, Air Minum, Sanitasi dan Lingkungan.
3. Meningkatnya pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR
4. Tertatanya sistem transportasi daerah
5. Meningkatnya ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah
6. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah
7. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan
9. Meningkatnya ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan di semua jenjang Pendidikan
10. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau
11. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak
14. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemberdayaan sosial
15. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta proporsionalisme dan profesionalisme aparatur pemerintahan;
16. Meningkatnya peran serta masyarakat dan kualitas kehidupan demokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, perbedaan, keadilan dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif.
17. Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi legislator
18. Terwujudnya Pemerintah Desa yang Tangguh
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa
20. Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri
21. Meningkatnya nilai laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian
22. Terwujudnya kedaulatan pangan
23. Meningkatnya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani.

24. Tersedianya fasilitas permodalan, pemasaran dan kebutuhan penunjang kegiatan budi daya pertanian.
25. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan potensi daerah dan pelayanan masyarakat
26. Terciptanya sarana prasarana dalam mengembangkan keunggulan dan kreatifitas.
27. Tersedianya fasilitas permodalan sebagai pendukung pengembangan usaha dan kreatifitas.
28. Meningkatnya investasi daerah
29. Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat
30. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai destinasi wisata unggulan.
31. Terwujudnya pelestarian nilai budaya lokal dalam pengembangan sumber daya alam.

Sejalan dengan uraian sebelumnya bahwa agenda sasaran pembangunan di Kabupaten Pesawaran harus selaras dengan sasaran pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut diperlukan konektivitas antara sasaran pembangunan daerah dan sasaran pembangunan nasional. Adapun sasaran pembangunan nasional Tahun 2015-2019, meliputi :

1. Sasaran Makro, meliputi : pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia, meliputi : kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi : kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritime dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);

4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan dan Pengembangan Wilayah, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja); pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;

5. Sasaran pembangunan Reformasi Birokrasi, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Interkoneksi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran pembangunan di Kabupaten Pesawaran secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas/Sasaran Pembangunan Daerah
1	Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Mental
		1. Meningkatnya ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan di semua jenjang Pendidikan 2. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas/Sasaran Pembangunan Daerah
		5. Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak 6. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemberdayaan social
2	Pembangunan Sektor Unggulan	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
		1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan potensi daerah dan pelayanan masyarakat 2. Terciptanya sarana prasarana dalam mengembangkan keunggulan dan kreatifitas. 3. Tersedianya fasilitas permodalan sebagai pendukung pengembangan usaha dan kreatifitas. 4. Meningkatnya investasi daerah 5. Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat 6. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai destinasi wisata unggulan. 7. Terwujudnya pelestarian nilai budaya lokal dalam pengembangan sumber daya alam.
		Peningkatan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan:
		1. Meningkatnya nilai laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian 2. Terwujudnya kedaulatan pangan 3. Meningkatnya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani. 4. Tersedianya fasilitas permodalan, pemasaran dan kebutuhan penunjang kegiatan budi daya pertanian.
3	Pemerataan dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Bencana
		1. Meningkatnya ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas/Sasaran Pembangunan Daerah
		umum dan teknis infrastruktur daerah 2. Meningkatnya pembangunan dan kualitas Jalan/Jembatan, khususnya yang menjadi kewenangan Kabupaten 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Wilayah, Sumber Daya Air, Air Minum, Sanitasi dan Lingkungan. 4. Meningkatnya pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR 5. Tertatanya sistem transportasi daerah 6. Meningkatnya ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah 7. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah 8. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan 9. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan 10. Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri
4	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta Percepatan Pembangunan Perdesaan
		1. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta proporsionalisme dan profesionalisme aparatur pemerintahan; 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan kualitas kehidupan demokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, perbedaan, keadilan dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif.

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Prioritas/Sasaran Pembangunan Daerah
		3. Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi legislator 4. Terwujudnya Pemerintah Desa yang Tangguh 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator dan target capaian sasaran pembangunan di Kabupaten Pesawaran disusun sebagai bagian dari capaian terhadap kinerja pembangunan di Daerah Kabupaten Pesawaran. Target kinerja tahun 2018 disusun atas prioritas program kegiatan yang dipilih sesuai dengan tema rencana kerja pembangunan tahun 2018, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Tahun 2018

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Bencana			
	Meningkatnya ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah	Jumlah dokumen perencanaan teknis Infrastruktur Daerah	Dok.	10
		Jumlah Dokumen Perencanaan Umum/Makro	Dok.	4
	Meningkatnya pembangunan dan kualitas Jalan/Jembatan, khususnya yang menjadi kewenangan Kabupaten	% Kondisi Jalan/Jembatan Kabupaten Mantap	%	70%
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Wilayah, Sumber Daya Air, Air Minum, Sanitasi dan Lingkungan	% Kondisi Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	65%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		% Terbangunnya Embung dan bangunan penampung air lainnya	%	35%
		% Peningkatan penanganan daerah rawan banjir	%	40%
		% Kondisi Infrastruktur wilayah yang baik	%	65%
		Tingkat Akses Air Minum masyarakat (%)	%	65%
		Tingkat Akses Sanitasi Masyarakat (%)	%	90%
	Meningkatnya pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR	% Penurunan Luas Kawasan Kumuh Perdesaan (Ha)	Ha	150
		% Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi MBR	%	17%
	Tertatanya sistem transportasi daerah	% Ketersediaan sarana prasarana perhubungan yang baik	%	75%
		% Tingkat pelayanan dan keselamatan transportasi	%	80%
		% Pengujian kendaraan bermotor	%	77%
	Terwujudnya Tata Ruang Wilayah	Tersedianya *Dokumen Revisi* RTRW, dan Dokumen Rencana Detail/Rencana Rinci yang dibutuhkan stakeholder	Dok.	2
		Sosialisasi dan Implementasi Program secara Partisipatif	Kali	1

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Tercapainya tingkat kesesuaian antara perencanaan Ruang dengan pemanfaatan Ruang	SEDANG	BAIK
		Tercapainya tingkat kesesuaian antara perencanaan Ruang dengan pemanfaatan Ruang	SEDANG	BAIK
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Mental			
	Meningkatnya ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan di semua jenjang Pendidikan	% Sarana prasarana sekolah dalam kondisi baik	%	87.50%
	Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau	Jumlah peserta bina murid (Siswa)	Siswa	1,200
		Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI); (SMP/MTs)	%	97,43
		SPM dan Akreditasi Sekolah	%	60%
		Angka Melek Huruf	%	91.50%
		Meningkatnya budaya gemar membaca dan IT masyarakat	%	100%
	Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan	Meningkatnya kompetensi/sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	%	75%
		Meningkatnya Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	60%
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	% Cakupan Penduduk yang terlayani	%	95%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Jaminan Kesehatan		
		%Prosentase pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat	%	90%
		%Cakupan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	60%
		%Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	%	85%
		%Penurunan resiko penyakit tidak menular	%	24%
		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	Kec.	11 kec
		%cakupan peningkatan Sarpras Puskesmas Pustu dan Jaringannya	%	85%
		%Cakupan ketersediaan sarpras rumah sakit yang memadai	%	75%
		%Sarpras rumah sakit dalam kondisi baik	%	75%
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	%	90%
		Persentase cakupan puskesmas yang terakreditasi	%	65%
		%Cakupan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia	%	65%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		%Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	65%
	Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak	Tersosialisasinya Program Keluarga Berencana	%	75%
		Terlaksananya pendampingan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja	%	75%
		Terlaksananya pelayanan pemasangan alat kontrasepsi	Orang	27,258
		Meningkatnya peranserta masyarakat dalam KB mandiri	%	95%
		%Cakupan Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	%	52%
		Tersosialisasinya pembinaan tumbuh kembang anak	%	80%
		%Cakupan kelompok bina keluarga	%	58%
		Terlaksananya sosialisasi regulasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	%	75%
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarustamaan gender & anak	%	73%
		Peningkatan program perlindungan perempuan	%	75%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Peningkatan peran serta kaum ibu dalam pembangunan	%	80%
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemberdayaan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan dan kesejahteraan keagamaan	%	93%
		Terciptanya kerukunan hidup beragama dimasyarakat	%	100%
		Meningkatnya Keberdayaan Fakir Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	%	75%
		Meningkatnya keberfungsian Sosial Klien Individu (casework)	%	85%
		Meningkatnya Kepedulian Lembaga dan Masyarakat Pada Usaha Kesejahteraan Sosial	%	90%
3	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta Percepatan Pembangunan Perdesaan menuju Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri			
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas manajemen pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat serta proporsionalisme dan profesionalisme aparatur pemerintahan	Meningkatnya pemanfaatan Data /Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi	%	60%
		Meningkatnya Pelayanan Kependudukan melalui ketersediaan Data/Informasi	%	75%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan *e-Government* Pemerintah Daerah	%	100%
		Terciptanya Informasi Pemerintah Daerah yang terbuka dan dapat dipertanggungja wabkan	%	80%
		Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	%	70%
		Tersedianya bangunan gedung perkantoran, Rumah Jabatan dan Rumah Dinas (Unit)	Unit	4
		Meningkatnya kelancaran tugas pemerintahan	%	90%
		Terselenggaraya pelayanan administrasi perkantoran	%	95%
		Meningkatnya pelayanan aparatur kecamatan	Kec/Des/ Kel	14; 151; 5

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		%Peningkatan Disiplin Aparatur	%	95%
		%Peningkatan kompetensi aparatur melalui Diklat, Sosialisasi, dan Bimtek	%	70%
		%Terselenggaran ya pengembangan karir ASN	%	100%
		%Tersusunnya produk hukum berdasarkan kajian,dan penyelarasan dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku	%	100%
		Perencanaan pembangunan yang sinergi, terintegrasi, dan tersinkronisasi	%	85%
		Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Aparatur Pemerintahan terhadap peraturan yang berlaku	%	95%
		Meningkatnya pelayanan penanganan aduan Masyarakat	%	95%
		Dokumen Arsip Daerah yang terpelihara dengan baik	%	95%
		Terselenggaranya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang optimal		OPTIMAL

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap nilai-nilai ajaran agama	%	80%
		Kewajaran Laporan Keuangan dengan Opini WTP		WTP
		Terwujudnya penyusunan dasar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah dari proses penganggaran, hingga pertanggung jawaban	%	9-14%
	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kualitas kehidupan demokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, perbedaan, keadilan dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif.	%Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan yang berkeadilan	%	90%
		Terciptanya kondisi yang aman, tertib dan tentram di masyarakat.	%	95
		Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat	%	95%
	Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi legislator	%Peningkatan pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi anggota DPRD	%	95%
	Terwujudnya Pemerintah Desa yang Tangguh dan Mandiri	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	%	47%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Terlaksananya SOP dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	%	48%
	Pemberdayaan masyarakat Desa	Meningkatnya Pembinaan Lembaga/Organisasi Desa dan Tenaga Teknis Masyarakat	%	40%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	82%
		Terwujudnya Desa Tangguh, Maju, dan Berprestasi	%	60%
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan pengarusutamaan koperasi dan UMKM			
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan pelestarian nilai budaya potensi daerah dan pelayanan masyarakat	Jumlah kelompok pelaku ekonomi kreatif	Kelompok	65
		Jumlah Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya yang dibina	Kelompok	1
		Terlaksananya Pagelaran karya seni kreasi baru (kali)	Kali	12
		Meningkanya jumlah sanggar yang aktif	Kelompok	4
		Jumlah Cagar Budaya yang terkelola	Lokasi	18
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	%	95%
		Jumlah cabang olahraga dan Atlet Berprestasi	Cabor:Atlet	22;140

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Terciptanya sarana prasarana dalam mengembangkan keunggulan dan kreatifitas.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Latihan Kerja	%	5.81%
		Meningkanya sarana prasarana olahraga (Gelandang Olahraga) (Perlengkapan Olahraga)	Unit	1 ; 25
	Tersedianya fasilitas permodalan sebagai pendukung pengembangan usaha dan kreatifitas.	Bertambahnya sentra-sentra usaha mikro kecil menengah dan koperasi	Kelompok	5
		Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	55%
		Meningkatnya Jumlah UMKM Produktif (Lembaga)	Lembaga	350
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi (PMA dan PMDN)	%	60%
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	68%
		Tersedianya regulasi/pedoman pengembangan penanaman modal sesuai aturan perundang-undangan	%	85%
	Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat	Rasio Penduduk yang bekerja	%	93.00%
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.34
		Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	%	60%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Terfasilitasinya Perpindahan Serta Penempatan Transmigran	Orang	25
	Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Persentase Luas RTH dalam kondisi baik	%	30%
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	%	75%
		Kesesuaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Air dan Udara) dengan Baku Mutu		SESUAI
		Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA dalam Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	%	80%
		Meningkatnya Cadangan Sumber Daya Alam	%	85%
	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai destinasi wisata unggulan.	Terbentuknya BUMD Kepariwisataan		TIDAK ADA
		Terfasilitasinya Pengembangan Kemitraan Pembangunan Destinasi Wisata	%	100%
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Org / Tahun	850
	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan Umum)	Ton	13.325; 8,80
		Persentase Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	%	85%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan bencana alam/non alam	%	75%
	Terwujudnya pelestarian nilai budaya lokal dalam pengembangan sumber daya alam	Meningkatnya Program Pengembangan Sumber Daya Alam berbasis Kearifan Lokal	%	40%
5	Peningkatan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Meningkatnya Produktivitas Pertanian/ Perkebunan	%	13.50%
		Meningkatnya Produktivitas Hasil Peternakan	%	13.50%
		Meningkatnya Pemasaran Hasil Produktivitas Peternakan	%	13.50%
		Peningkatan produktivitas hewan ternak	%	13.50%
	Terwujudnya kedaulatan pangan	Meningkatnya cadangan pangan	%	88%
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Budidaya Laut, Budidaya Air Payau, dan Jumlah Benih Bermutu Baik	Ton	1.048 ; 1.530 ; 16.275 ; 1.200.000 ekor
		Meningkatnya Konsumsi Ikan Penduduk ; Volume Produk Olahan Perikanan; Kelompok Pengolahan Ikan	(Kg/Kapia/Th); Ton; Unit	27.30 ; 5,6 ; 32
		Meningkatnya kesejahteraan petani melalui	%	13.95

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Nilai Tukar Petani (NTP)		
	Meningkatnya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian	%	37%
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi Peternakan	%	45%
		Terwujudnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	%	67%
	Tersedianya fasilitas permodalan, pemasaran dan kebutuhan penunjang kegiatan budi daya pertanian.	Terfasilitasinya permodalan dan kebutuhan penunjang kegiatan budidaya pertanian	%	100%
		Terbentuknya BUMD Pertanian	-	ADA
		Pola Pangan harapan melalui peningkatan diversifikasi pangan	%	88%
	Meningkatnya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Budidaya Laut, Budidaya Air Payau, dan Jumlah Benih Bermutu Baik	Ton	1.048 ; 1.530 ; 16.275 ; 1.200.000
		Jumlah Konsumsi Ikan Penduduk ; Volume Produk Olahan Perikanan; Kelompok Pengolahan Ikan	Kg/Kapia/Th;ton; Unit	27.30 ; 5,6 ; 32
		% Jumlah tenaga penyuluh berkompeten dan berdayaguna	%	67%

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Tersedianya fasilitas permodalan, pemasaran dan kebutuhan penunjang kegiatan budi daya pertanian.	Fasilitasi permodalan dan kebutuhan penunjang kegiatan budidaya pertanian	%	100%
		Terbentuknya BUMD Pertanian	-	1

Didalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran diperlukan interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesawaran. Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU Kabupaten didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didalam perhitungan indikator Renstra SKPD memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator Kabupaten Pesawaran.

Sasaran pembangunan di Kabupaten Pesawaran yang dijabarkan kedalam sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agenda prioritas tahunan pada periode 5 (lima) tahun ke-II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten Pesawaran. Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan, sasaran Kabupaten, serta sasaran OPD di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.5
Prioritas/Sasaran Daerah dan Indikator dan Target Kinerja untuk Tahun 2018

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Bencana					
	Meningkatnya ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah	Jumlah dokumen perencanaan teknis Infrastruktur Daerah	Dok.	10	Program Perencanaan Teknis Infrastruktur Daerah	DPUPR, DPERKIM, DISDIKNAS, DISKES, DISTAN, DISHUB
		Jumlah Dokumen Perencanaan Umum/Makro	Dok.	4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	BAPPEDA
	Meningkatnya pembangunan dan kualitas Jalan/Jembatan, khususnya	% Kondisi Jalan/Jembatan Kabupaten Mantap	%	70%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPUPR, DPERKIM

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	yang menjadi kewenangan Kabupaten				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPUPR, DPERKIM
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Wilayah, Sumber Daya Air, Air Minum, Sanitasi dan Lingkungan	% Kondisi Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	65%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	DPUPR
		% Terbangunnya Embung dan bangunan penampung air lainnya	%	35%	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	DPUPR
		% Peningkatan penanganan daerah rawan banjir	%	40%	Program Pengendalian Banjir	DPUPR

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		% Kondisi Infrastruktur wilayah yang baik	%	65%	Program Pembangunan dan Pemeliharan Talud/Bronjong/Saluran Drainase/Gorong-Gorong	DPUPR, DPERKIM
		Tingkat Akses Air Minum masyarakat (%)	%	65%	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	DPUPR, DPERKIM
		Tingkat Akses Sanitasi Masyarakat (%)	%	90%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	DPERKIM
	Meningkatnya pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR	% Penurunan Luas Kawasan Kumuh Perdesaan (Ha)	Ha	150	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	DPERKIM
		% Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi MBR	%	17%	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	BAPPEDA, DPUPR, DPERKIM

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	Tertatanya sistem transportasi daerah	% Ketersediaan sarana prasarana perhubungan yang baik	%	75%	Program Pengembangan Perumahan	DPERKIM
		% Tingkat pelayanan dan keselamatan transportasi	%	80%	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
		% Pengujian kendaraan bermotor	%	77%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengendalian Lalu Lintas	DISHUB
	Terwujudnya Tata Ruang Wilayah	Tersedianya *Dokumen Revisi* RTRW, dan Dokumen Rencana Detail/Rencana Rinci yang dibutuhkan stakeholder	Dok.	2	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	DISHUB

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Sosialisasi dan Implementasi Program secara Partisipatif	Kali	1	Program Perencanaan Tata Ruang	BAPPEDA, DPUPR, DPERKIM
		Tercapainya tingkat kesesuaian antara perencanaan Ruang dengan pemanfaatan Ruang	SEDANG	BAIK	Program Pemanfaatan Ruang	BAPPEDA, DPUPR, DPERKIM, DPMPTS
		Tercapainya tingkat kesesuaian antara perencanaan Ruang dengan pemanfaatan Ruang	SEDANG	BAIK	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	BAPPEDA, DPUPR, DPERKIM, DPMPTS, DLH
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Mental					

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan di semua jenjang Pendidikan	% Sarana prasarana sekolah dalam kondisi baik	%	87.50%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah	DISDIKBUD
	Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau	Jumlah peserta bina murid (Siswa)	Siswa	1,200	Program Bina Murid	DISDIKBUD
		Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI); (SMP/MTs)	%	97,43	Program Pendidikan Dasar	DISDIKBUD
		SPM dan Akreditasi Sekolah	%	60%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DISDIKBUD
		Angka Melek Huruf	%	91.50%	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	DISDIKBUD
		Meningkatnya budaya gemar membaca dan IT masyarakat	%	100%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	DISDIKBUD, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Diskominfo

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan	Meningkatnya kompetensi/sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	%	75%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
		Meningkatnya Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	60%	Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidikan	DISDIKBUD
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	% Cakupan Penduduk yang terlayani Jaminan Kesehatan	%	95%	Program Pendampingan Kesehatan Masyarakat	DISKES
		%Prosentase pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat	%	90%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DISKES

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		%Cakupan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	60%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DISKES
		%Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	%	85%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DISKES
		%Penurunan resiko penyakit tidak menular	%	24%	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	DISKES
		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	Kec.	11 kec	Program Pengawasan dan Pengendalian Obat dan Makanan	DISKES

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		%cakupan peningkatan Sarpras Puskesmas Pustu dan Jaringannya	%	85%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	DISKES
		%Cakupan ketersediaan sarpras rumah sakit yang memadai	%	75%	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	DISKES
		%Sarpras rumah sakit dalam kondisi baik	%	75%	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	DISKES
		Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	%	90%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	DISKES

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase cakupan puskesmas yang terakreditasi	%	65%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DISKES
		%Cakupan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia	%	65%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita dan Lansia	DISKES
		%Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	65%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	DISKES
	Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak	Tersosialisasinya Program Keluarga Berencana	%	75%	Program Keluarga Berencana	DPPKB

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya pendampingan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja	%	75%	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	DPPKB
		Terlaksananya pelayanan pemasangan alat kontrasepsi	Orang	27,258	Program Pelayanan Kontrasepsi	DPPKB
		Meningkatnya peranserta masyarakat dalam KB mandiri	%	95%	Program Pembinaan Peran Serta Masyaarkat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	DPPKB
		%Cakupan Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	%	52%	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	DPPKB, DPPPA, DINAS SOSIAL, BADAN KESBANG

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Tersosialisasinya pembinaan tumbuh kembang anak	%	80%	Program Pengembangan Bahan Informasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	DPPKB, DPPPA
		%Cakupan kelompok bina keluarga	%	58%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	DPPKB, DPPPA
		Terlaksananya sosialisasi regulasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	%	75%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	DPPPA
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarustamaan gender & anak	%	73%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	DPPPA

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan program perlindungan perempuan	%	75%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	DPPPA
		Peningkatan peran serta kaum ibu dalam pembangunan	%	80%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	DPPKB, DPPPA
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemberdayaan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan dan kesejahteraan keagamaan	%	93%	Program Bina Mental Keagamaan	SETDA
		Terciptanya kerukunan hidup beragama dimasyarakat	%	100%	Program Meningkatkan Peran dan Fungsi Sarana dan Prasarana Keagamaan	SETDA

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Keberdayaan Fakir Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	%	75%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINAS SOSIAL
		Meningkatnya keberfungsian Sosial Klien Individu (casework)	%	85%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL
		Meningkatnya Kepedulian Lembaga dan Masyarakat Pada Usaha Kesejahteraan Sosial	%	90%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	DINAS SOSIAL

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
3	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta Percepatan Pembangunan Perdesaan menuju Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri					
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas manajemen pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat serta proporsionalisme dan	Meningkatnya pemanfaatan Data /Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi	%	60%	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	SELURUH OPD

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	profesionalisme aparatur pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan melalui ketersediaan Data/Informasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	%	75%	Program Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan *e-Government* Pemerintah Daerah	%	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	SELURUH OPD

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Terciptanya Informasi Pemerintah Daerah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan	%	80%	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	DISKOMINFO
		Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	%	70%	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA)	BALITBANGDA
		Tersedianya bangunan gedung perkantoran, Rumah Jabatan dan Rumah Dinas (Unit)	Unit	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	DPUPR
		Meningkatnya kelancaran tugas pemerintahan	%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SELURUH OPD

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Terselenggaraya pelayanan administrasi perkantoran	%	95%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SELURUH OPD
		Meningkatnya pelayanan aparatur kecamatan	Kec/Des/Kel	14; 151; 5	Program Penataan wilayah	SETDA
		%Peningkatan Disiplin Aparatur	%	95%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SELURUH OPD
		%Peningkatan kompetensi aparatur melalui Diklat, Sosialisasi, dan Bimtek	%	70%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SELURUH OPD
		%Terselenggaranya pengembangan karir ASN	%	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		%Tersusunnya produk hukum berdasarkan kajian,dan penyelarasan dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku	%	100%	Program Penataan dan Peraturan Perundang-undangan	SELURUH OPD
		Perencanaan pembangunan yang sinergi, terintegrasi, dan tersinkronisasi	%	85%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	SELURUH OPD
		Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Aparatur Pemerintahan terhadap peraturan yang berlaku	%	95%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	INSPEKTORAT

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelayanan penanganan aduan Masyarakat	%	95%	Program Menginsentifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	INSPEKTORAT
		Dokumen Arsip Daerah yang terpelihara dengan baik	%	95%	Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Dinas PERPUSTAKAAN dan ARSIP
		Terselenggaranya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang optimal		OPTIMAL	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	SETDA
		Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap nilai-nilai ajaran agama	%	80%	Program Pembinaan dan Pencerahan Spritual bagi Aparatur	SETDA

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Kewajaran Laporan Keuangan dengan Opini WTP		WTP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD
		Terwujudnya penyusunan dasar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah dari proses penganggaran, hingga pertanggung jawaban	%	9-14%	Program Peningkatan Kapasitas, Pembinaan, Fasilitas dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kualitas kehidupan demokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, perbedaan, keadilan dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif.	%Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan yang berkeadilan	%	90%	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	DPERKIM, SETDA
		Terciptanya kondisi yang aman, tertib dan tentram di masyarakat.	%	95	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	SATPOL PP, BADAN KESBANG
		Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat	%	95%	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	SATPOL PP, BPPD, BADAN KESBANG

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi legislator	%Peningkatan pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi anggota DPRD	%	95%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SEKR. DPRD
	Terwujudnya Pemerintah Desa yang Tangguh dan Mandiri	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	%	47%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	SETDA
		Terlaksananya SOP dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	%	48%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD, KEC.
	Pemberdayaan masyarakat Desa	Meningkatnya Pembinaan Lembaga/Organisasi Desa dan Tenaga Teknis Masyarakat	%	40%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	DPMD, KEC.
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	82%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	DPMD, KEC.

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Terwujudnya Desa Tangguh, Maju, dan Berprestasi	%	60%	Program Desa Maju Andan Jejama (DMAJ)	SETDA, DPMD, KEC.
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan pengarusutamaan koperasi dan UMKM					
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan pelestarian nilai budaya potensi daerah dan pelayanan masyarakat	Jumlah kelompok pelaku ekonomi kreatif	Kelompok	65	Program Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media Desain dan IPTEK	Diskop UKM, Disdikbud,Dinas Pariwisata
		Jumlah Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya yang dibina	Kelompok	1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Disdikbud,Dinas Pariwisata
		Terlaksananya Pagelaran karya seni kreasi baru (kali)	Kegiatan	12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Disdikbud,Dinas Pariwisata

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkanya jumlah sanggar yang aktif	Kelompok	4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Disdikbud,Dinas Pariwisata
		Jumlah Cagar Budaya yang terkelola	Lokasi	18	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Disdikbud,Dinas Pariwisata
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	%	95%	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Dispora, Disdikbud,Dinas Pariwisata
		Jumlah cabang olahraga dan Atlet Berprestasi	Cabor:Atlet	22;140	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Dispora, Disdikbud,Dinas Pariwisata
	Terciptanya sarana prasarana dalam mengembangkan keunggulan dan kreatifitas.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Latihan Kerja	%	5.81%	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkanya sarana prasarana olahraga (Gelandang Olahraga) (Perlengkapan Olahraga)	Unit	1 ; 25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora, DPUPR
	Tersedianya fasilitas permodalan sebagai pendukung pengembangan usaha dan kreatifitas.	Bertambahnya sentra-sentra usaha mikro kecil menengah dan koperasi	Kelompok	5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Diskop UKM
		Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	%	55%	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Diskop UKM
		Meningkatnya Jumlah UMKM Produktif (Lembaga)	Lembaga	350	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Disperindag

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi (PMA dan PMDN)	%	60%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTS, Disperindag
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	68%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Disperindag
		Tersedianya regulasi/pedoman pengembangan penanaman modal sesuai aturan perundang-undangan	%	85%	Program Penyiapan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	DPMPTS, SETDA
	Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat	Rasio Penduduk yang bekerja	%	93.00%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	%	60%	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terfasilitasinya Perpindahan Serta Penempatan Transmigran	Orang	25	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Persentase Luas RTH dalam kondisi baik	%	30%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH, DPERKIM
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	%	75%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLH, DPERKIM
		Kesesuaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Air dan Udara) dengan Baku Mutu		SESUAI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA dalam Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	%	80%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLH
		Meningkatnya Cadangan Sumber Daya Alam	%	85%	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	DLH
	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai destinasi wisata unggulan.	Terbentuknya BUMD Kepariwisataan		TIDAK ADA	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Terfasilitasinya Pengembangan Kemitraan Pembangunan Destinasi Wisata	%	100%	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Org / Tahun	850	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan Umum)	Ton	13.325; 8,80	Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Pariwisata
		Persentase Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	%	85%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP, Kesbang, BPBD
		Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan bencana alam/non alam	%	75%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kebakaran	Satpol PP, BPBD

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya pelestarian nilai budaya lokal dalam pengembangan sumber daya alam	Meningkatnya Program Pengembangan Sumber Daya Alam berbasis Kearifan Lokal	%	40%	Program Pengembangan Sumber Daya Alam berbasis Kearifan Lokal	Dinas Pariwisata
5	Peningkatan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Meningkatnya Produktivitas Pertanian/ Perkebunan	%	13.50%	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian/ Perkebunan	Distan
		Meningkatnya Produktivitas Hasil Peternakan	%	13.50%	Program Peningkatan Produktivitas Hasil Peternakan	Distan
		Meningkatnya Pemasaran Hasil Produktivitas Peternakan	%	13.50%	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produktivitas Peternakan	Distan

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan produktivitas hewan ternak	%	13.50%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Distan
	Terwujudnya kedaulatan pangan	Meningkatnya cadangan pangan	%	88%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Budidaya Laut, Budidaya Air Payau, dan Jumlah Benih Bermutu Baik	Ton	1.048 ; 1.530 ; 16.275 ; 1.200.000 ekor	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Konsumsi Ikan Penduduk ; Volume Produk Olahan Perikanan; Kelompok Pengolahan Ikan	(Kg/Kapia/Th); Ton; Unit	27.30 ; 5,6 ; 32	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Perikanan

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP)	%	13.95	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Distan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan
	Meningkatnya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pertanian	%	37%	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Distan
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi Peternakan	%	45%	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Distan
		Terwujudnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	%	67%	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Distan
	Tersedianya fasilitas permodalan, pemasaran dan kebutuhan penunjang kegiatan budi daya pertanian.	Terfasilitasinya permodalan dan kebutuhan penunjang kegiatan budidaya pertanian	%	100%	Program Usaha Agrobisnis Perdesaaan	Distan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan

No	Prioritas/Sasaran Daerah	Kinerja			Nama Program	OPD Penanggungjawab
		Indikator	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7
		Terbentuknya BUMD Pertanian	-	ADA	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Distan

Tabel 4.6

Target Kinerja Indikator Kunci pada Tahun 2018

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
1.1.1	Pertumbuhan ekonomi	5,11	5,71	6 ± 1
1.1.2	PDRB per Kapita (Juta Rp)	21.63	24.44	29.34
1.1.3	Laju Inflasi	2,75	4 ± 2	4 ± 2
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**			
1.2.1	**Pendidikan**			
1.2.1.1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,00 Tahun	13,50 Tahun	17,50 Tahun
1.2.1.2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.5	9	12
2.1.1.3	Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI);(SMP/MTS) (%)	96.33%	97.43%	100%
1.2.1.4	Angka Partisipasi Sekolah			
	7 - 12 Tahun	99.65	99.85	100
	13 - 15 Tahun	93	95	100
	Angka Melek Huruf	90.50%	91.50%	93%
1.2.2	**Kesehatan**			
1.2.2.1	Jumlah Kematian Ibu	3 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
1.2.2.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	4.5	4	3.7
1.2.2.3	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup	995.5	996	996.3
1.2.3	**Sumberdaya Manusia**			
1.2.3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,70	64,54	66.00-71.00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
2.1	**Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
2.1.1	Pendidikan			
1.2.1.1	*Angka Partisipasi Murni (APM)*			
	SD/MI (%)	98	98.5	99.25
	SLTP/MTs (%)	78	78.5	80
2.1.1.2	%Kondisi sarana prasarana sekolah dalam kondisi baik	82.50%	87.50%	95.00%
2.1.1.3	Jumlah peserta bina murid (Siswa)	0	1,200	6,000
2.1.1.4	SPM dan Akreditasi Sekolah	40%	60%	90%
2.1.1.5	Meningkatnya kompetensi/sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	65%	75%	90%
2.1.1.6	Meningkatnya Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45%	60%	90%
2.1.2	**Kesehatan**			
2.1.2.1	% Jumlah Penduduk yang terlayani Jaminan Kesehatan	80%	95%	95%
2.1.2.2	Angka harapan hidup (AHH) (Tahun)	67,83	71.5	71.8
2.1.2.3	Prevalensi Gizi Buruk per 100 balita (Cakupan Gizi Buruk mendapatkan Perawatan)	0.015	0.01	0.01
2.1.2.4	% Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat	85%	90%	100%
2.1.2.5	% Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat	55%	60%	80%
2.1.2.6	% Pengendalian penyebaran dan pemberantasan penyakit menular	75%	85%	100%
2.1.2.7	% Terkendalinya penyakit tidak menular	24%	24%	22%
2.1.2.8	Meningkatkan mutu pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	11 kec	11 kec	11 kec
2.1.2.9	% Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	75%	85%	100%
2.1.2.10	% Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit	45%	75%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
2.1.2.11	% Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85%	90%	95%
2.1.2.12	% Peningkatan mutu pelayanan kesehatan anak balita, remaja dan lansia	55%	65%	80%
2.1.2.13	% Peningkatan status kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan Ibu, bayi baru lahir, dan anak	58%	65%	0.8
2.1.3	**Pekerjaan Umum**			
2.1.3.1	Ketersediaan dokumen perencanaan teknis Infrastruktur Daerah	70%	100%	100%
2.1.3.2	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Umum/Makro	65%	75%	90%
2.1.3.3	% Kondisi Jalan/Jembatan Kabupaten Mantap	65%	70%	90%
2.1.3.4	% Kondisi Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	50%	65%	85%
2.1.3.5	% Terbangunnya Embung dan bangunan penampung air lainnya	25%	35%	65%
2.1.3.6	% Peningkatan penanganan daerah rawan banjir	30%	40%	85%
2.1.3.7	Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	30%	40%	85%
2.1.4	**Penataan Ruang**			
2.1.4.1	Tersedianya *Dokumen Revisi* RTRW, dan Dokumen Rencana Detail/Rencana Rinci yang dibutuhkan stakeholder	0 Dok.	2 Dok.	17 Dok.
2.1.4.2	Sosialisasi dan Implementasi Program secara Partisipatif		1 Kali	14 Kali
2.1.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
2.1.5.1	% Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi MBR		17%	26%
2.1.6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
2.1.6.1	Terciptanya kondisi yang aman, tertib dan tentram.	85	95	95
2.1.6.2	Telaksananya Sistem Keamanan Lingkungan masyarakat	-	95%	95%
	Terlaksananya Manajemen Bencana	65%	75%	80%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
2.1.6.3	Kesiapan Tanggap Siaga Bencana dan Lingkungan	75%	85%	90%
2.1.7	**Sosial**			
2.1.7.1	% Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan	100%	100%	100%
2.1.7.2	% Penanganan Fakir miskin,komunitas adat terpencil (KAT) & Penyandang Masalah kesejahtraan Sosial (PMKS)	66%	75%	90%
2.1.7.3	% Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	75%	85%	95%
2.1.7.4	% Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	85%	95%	95%
2.2	**Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
2.2.1	**Tenaga Kerja**			
2.2.1.1	Kemiskinan (%)	17.61	15,84	14.36
2.2.1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65.44	69.34	73.24
2.2.1.3	% Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	7,27	5,71	5.50-6.50
2.2.1.4	% perlindungan terhadap tenaga kerja	40%	60%	80%
2.2.1.5	Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi	25 Orang	25 Orang	150 Orang
2.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
2.2.2.1	Terimplementasinya regulasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	-	75%	90%
2.2.2.2	%Jumlah lembaga/organisasi yang mendukung kesetaraan gender	55%	73%	100%
2.2.2.3	Meningkatnya perempuan berkualitas	65%	75%	90%
2.2.2.4	Meningkatnya Peran serta Kelompok gender dalam pembangunan	70%	80%	95%
2.2.3	**Pangan**			
2.2.3.1	Pola Pangan harapan melalui peningkatan diversifikasi pangan	85%	88%	95%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
2.2.4	**Pertanahan**			
2.2.4.1	Terdokumentasinya Sertifikat Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	55%	65%	80%
2.2.4.2	Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan yang berkeadilan	80%	90%	90%
2.2.5	**Lingkungan Hidup**			
2.2.5.1	Persentase Luas RTH (%)	30%	30%	35%
2.2.5.2	%Pelayanan Persampahan	65%	75%	90%
2.2.5.3	%Perlindungan dan Konservasi SDA dalam Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	-	80%	90%
2.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
2.2.6.1	Tersedianya Data/Informasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	65%	75%	90%
2.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
2.2.7.1	%Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27%	47%	77%
2.2.7.2	SOP dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	18%	48%	78%
2.2.7.3	Meningkatnya Pembinaan Lembaga/Organisasi Desa dan Tenaga Teknis Masyarakat	34%	40%	80%
2.2.7.4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	72%	82%	97%
2.2.7.5	Cakupan Desa Tangguh, Maju, dan Berprestasi	-	60%	95%
2.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
2.2.8.1	Meningkatnya kompetensi dan kesejahtraan petugas KB	65%	75%	90%
2.2.8.2	Jumlah Remaja yang memahami KRR	65%	75%	90%
2.2.8.3	Jumlah Akseptor KB (Orang)	-	27,258	28,831
2.2.8.4	Meningkanya kelompok ketahanan keluarga stratifikasi paripurna	85%	95%	95%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
2.2.8.5	Menguatnya respon masyarakat dan remaja dalam pencegahan dan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	42%	52%	67%
2.2.8.6	Tersusunnya Data base pembinaan tumbuh kembang anak	-	80%	95%
2.2.8.7	Terbentuknya kelompok bina keluarga sejahtera	-	58%	100%
2.2.9	**Perhubungan**			
2.2.9.1	% Ketersediaan sarana prasarana perhubungan yang baik	65%	75%	90%
2.2.9.2	% Tingkat pelayanan dan keselamatan transportasi	70%	80%	95%
2.2.9.3	% Pengujian kendaraan bermotor	-	77%	85%
2.2.10	**Komunikasi dan Informatika**			
2.2.10.1	% pemanfaatan *e-Government* Pemerintah Daerah	-	100%	100%
2.2.10.2	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	70%	80%	95%
2.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2.2.11.1	Terbentuknya sentra-sentra usaha mikro kecil menengah dan Koperasi	-	5 Klmpk	25 Klmpk
2.2.11.2	%Jumlah Koperasi Aktif	35.00%	55%	85%
2.2.12	**Penanaman Modal**			
2.2.12.1	Jumlah Investor (PMA dan PMDN) yang terealisasi	45%	60%	90%
2.2.12.2	Tersedianya regulasi/pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi sarana dan peluang investasi daerah	75%	85%	90%
2.2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**			
2.2.13.1	% Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	85%	95%	95%
2.2.13.2	Jumlah pembinaan kelembagaan olah raga dan Jumlah Atlet Berprestasi (Orang)	20;110	22;140	25;200
2.2.13.3	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga berupa GOR dan Perlengkapan Olahraga	1 Unit Lap. Mini	1 unit GOR (Tahap	1 unit GOR ; 3 unit Lapangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
			2); 25 Unit Perlengkapan Olahraga	Mini; 125 Unit Perlengkapan Olahraga
2.2.14	**Statistik**			
2.2.14.1	Tersedianya Data/Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi	40%	60%	90%
2.2.15	**Persandian**			
2.2.15.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kedinasan	OPTIMAL	OPTIMAL	OPTIMAL
2.2.16	Kebudayaan			
2.2.16.1	Jumlah Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya yang dibina		1	11
2.2.16.2	Jumlah Pagelaran karya seni kreasi baru		12	70
2.2.16.3	Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal		4	27
2.2.16.4	Jumlah Cagar Budaya yang terkelola	14	18	114
2.2.17	**Perpustakaan**			
2.2.17.1	Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat	60%	80%	100%
2.2.18	**Kearsipan**			
2.2.18.1	Terpeliharanya Dokumen Arsip Daerah	85%	95%	100%
2.3	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**			
2.3.1	**Perikanan dan Kelautan**			
2.3.1.1	Jumlah Konsumsi Ikan Penduduk ; Volume Produk Olahan Perikanan; Kelompok Pengolahan Ikan	24 Kg/Kapia/Th; 5,4 ton; 28 Unit	27.30 Kg/Kapia/Th; 5,6 ton; 32 Unit	35 Kg/Kapia/Th; 6,30 ton; 45 Unit
2.3.1.2	% Jumlah tenaga penyuluh berkompeten dan berdayaguna	27%	67%	100%
2.3.2	**Pariwisata**			
2.3.2.1	% Pengembangan Kemitraan Pembangunan Destinasi Wisata	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
2.3.2.2	Jumlah kelompok pelaku ekonomi kreatif	55	65	85
2.3.2.3	Implementasi Kearifan Lokal dalam pengmbangan potensi Sumber Daya Alam	-	40%	70%
2.3.3	**Pertanian**			
2.3.3.1	% Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian atas dasar Harga Berlaku	12.75%	13.50%	15.00%
2.3.3.2	Pola Pangan harapan melalui peningkatan diversifikasi pangan	85%	88%	95%
2.3.3.3	% Jumlah tenaga penyuluh berkompeten dan berdayaguna	27%	67%	100%
2.3.3.4	Fasilitasi permodalan dan kebutuhan penunjang kegiatan budidaya pertanian		100%	100%
2.3.4	**Perdagangan**			
2.3.4.1	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	62%	68%	80%
2.3.5	**Perindustrian**			
2.3.5.1	Meningkatnya Jumlah UMKM Produktif (Lembaga)	350	350	2,100
2.3.6	**Ketransmigrasian**			
2.3.6.1	Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi	25 Orang	25 Orang	150 Orang
2.4	**Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan**			
2.4.1	**Perencanaan**			
2.4.1.1	Terciptanya Koordinasi Integrasi Sinkronisasi Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	75%	85%	90%
2.4.1.2	Ketersediaan dokumen Perencanaan Umum/Makro	65%	75%	90%
2.4.2	**Keuangan**			
2.4.2.1	Opini BPK atas laporan keuangan	WDP	WTP	WTP
2.4.2.2	Meningkatnya Pendapatan dan pemanfaatan aset Daerah	9-14% Per Tahun	9-14% Per Tahun	9-14% Per Tahun
2.4.3	**Kepegawaian dan Diklat**			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
2.4.3.1	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui Diklat, Sosialisasi, dan Bimtek (orang)	55%	70%	90%
2.4.3.2	Terselenggaranya pengembangan karir ASN	100%	100%	100%
2.4.4	**Penelitian dan Pengembangan**			
2.4.4.1	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis Inovasi	-	70%	95%
2.4.5	**Sekretariat DPRD**			
2.4.5.1	Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD	70%	95%	95%
2.4.6	**Sekretariat Daerah**			
2.4.6.1	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas	90%	90%	90%
2.4.6.2	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	95%	95%	95%
2.4.6.3	Penataan Daerah Otonomi Baru	11 Kec; 144 Desa;1 Kelurahan	14 Kec; 151 Desa;5 Keluraha n	14 Kec; 151 Desa;5 Kelurahan
2.4.6.4	Penataan Wilayah	100%	100%	100%
2.4.6.5	Tegaknya Disiplin Aparatur	95%	95%	95%
2.4.6.6	Tersedianya dukungan regulasi untuk kelancaran pembangunan	100%	100%	100%
2.4.5.7	Peningkatan kualitas penghayatan fungsi dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama bagi aparatur pemerintah daerah	-	80%	90%
2.4.6	**Inspektorat**			
2.4.6.1	Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Aparatur Pemerintahan terhadap peraturan yang berlaku	95%	95%	95%
2.4.6.2	%Penanganan dan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat		95%	95%
3	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
3.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**			
3.1.1	Tingkat pertumbuhan realisasi PAD	25%	27%	35%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
3.1.2	% Alokasi Belanja Modal terhadap Total Belanja	25%	27%	30%
3.2	**Ketenagakerjaan**			
3.2.1	Rasio Penduduk yang bekerja	-	93.00%	96.00%
3.2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	69.34	73.24
3.2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.74-1.82	0.74-1.82	0.74-1.82
3.3	**Pertanian**			
3.3.1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian atas dasar Harga Berlaku	12.75%	13.50%	15.00%
3.3.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	103.85	103.95	104.1
3.3.3	Terbentuknya BUMD Pertanian	TIDAK ADA	ADA	ADA
3.4	**Pariwisata**			
3.4.1	Terbentuknya BUMD Kepariwisataan	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA
3.4.2	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	750.000 Org / Tahun	850.000 Org / Tahun	1.000.000 Org / Tahun
3.5	**Perikanan**			
3.5.1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan Umum)	11.620,40 ton; 8,10 ton	13.325 ton;8,80 ton	15.300,00 Ton; 10,00 ton
3.5.2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Budidaya Laut, Budidaya Air Payau, dan Jumlah Benih Bermutu Baik	107.00 ton; 10,213.00 ton; 682.00 ton; 800 ton	1.048 ton; 1.530 ton; 16.275 ton; 1.200.000 ekor	1.280 ton; 1.760 ton; 19.050 ton; 2.000.000 ekor
3.6	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
3.6.1	Tingkat akses air minum masyarakat (%)	-	65%	90%
3.6.2	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	274	66.14	0
3.6.3	Jumlah masyarakat mendapatkan akses sanitasi(%)	-	90%	90%
3.7	**Penataan Ruang**			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
		2016	2018	2021
3.7.1	Tercapainya tingkat kesesuaian antara perencanaan Ruang dengan pemanfaatan Ruang	SEDANG	BAIK	BAIK
3.8	**Lingkungan Hidup**			
3.8.1	Kesesuaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Air dan Udara) dengan Baku Mutu	SESUAI	SESUAI	SESUAI
3.8.2	Tersedianya Cadangan Sumber Daya Alam	75%	85%	90%

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom-up. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2018 memuat kewenangan urusan sebagai berikut:

1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
1.1	Urusan Pendidikan
1.2	Urusan Kesehatan
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1.6	Urusan Sosial
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2.1	Urusan Tenaga Kerja
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Urusan Pangan
2.4	Urusan Pertanahan
2.5	Urusan Lingkungan Hidup
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.9	Urusan Perhubungan
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.12 Urusan Penanaman Modal
2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.14 Urusan Statistik
2.15 Urusan Persandian
2.16 Urusan Kebudayaan
2.17 Urusan Perpustakaan
2.18 Urusan Kearsipan

3 URUSAN PILIHAN

3.1. Urusan Perikanan dan Kelautan
3.2 Urusan Pariwisata
3.3 Urusan Pertanian
3.4 Urusan Perdagangan
3.5 Urusan Perindustrian
3.6 Urusan Energi Sumber Daya Mineral
3.7 Urusan Ketransmigrasian

4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)

4.1 Perencanaan
4.2 Keuangan
4.3 Kepegawaian dan Diklat
4.4 Penelitian dan Pengembangan
4.5 Sekretariat DPRD
4.6 Sekretariat Daerah
4.7 Inspektorat
4.8 Kecamatan

5 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN*)

5.1 Penanggulangan Bencana Daerah
5.2 Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3 Sekretariat Korpri

Belanja daerah tahun 2018 disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 dilaksanakan untuk mendanai urusan konkuren yang merupakan kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang dan pendukung pemerintahan. Besarnya belanja tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.1.369.538.605.020,65.

Dalam pelaksanaan Anggaran hingga pertengahan tahun 2018, terjadi perubahan target pendapatan. Keadaan tersebut menyebabkan harus dilakukan perubahan atau pergeseran anggaran belanja pada unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. Perubahan dilakukan juga pada dokumen perencanaan PPAS APBD tahun anggaran 2018, menjadi PPAS Perubahan APBD 2018. Perubahan belanja daerah dilakukan dengan menambah kegiatan-kegiatan pada masing-masing OPD yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2018.

Kondisi di atas mempengaruhi kapasitas fiskal Kabupaten Pesawaran, sehingga perlu dilakukan penyusunan perubahan APBD. Belanja daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2018 setelah dilakukan perubahan diperkirakan sebesar Rp.1.405.053.462.886,91.

Belanja Program Kegiatan atau Belanja Langsung Kabupaten Pesawaran tahun 2018 setelah dilakukan perubahan APBD diperkirakan terjadi

penaikan dari semula Rp.669.938.597.572,65 menjadi Rp.713.210.187.182,00 atau bertambah sebesar Rp.43.271.589.609,35 (6,46%).

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan tetap mempertimbangkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur sarana prasarana Jalan dan Irigasi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi.

Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 disajikan pada **Tabel V.1.**

Prioritas dan Plafon Anggaran Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel V.2.;** Prioritas dan Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Kunkuren dan Perangkat Daerah Pelaksana dapat dilihat pada **Tabel V.3,** Sedangkan Rincian Plafon Anggaran OPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada **Tabel V.4.**

Tabel. Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**699,600,007,448.00**	**691,843,275,704.91**	**(7,756,731,743.09)**	**(1.11%)**
2.1.1	Belanja Pegawai	467,783,298,548.00	*458,897,883,000.00*	*-8,885,415,548.00*	-1.90%
2.1.2	Belanja Hibah	18,080,236,000.00	*19,080,236,000.00*	*1,000,000,000.00*	5.53%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,322,610,000.00	*2,854,015,000.00*	*531,405,000.00*	22.88%
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	209,413,862,900.00	209,011,136,900.00	*(402,726,000)*	-0.19%

NO	U R A I A N	APBD	PROYEKSI	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		2018	P-2018	Rp.	%
	kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik				
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	2,000,004,804.91	4,804.91	0.00%

Tabel. V.2 Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**669,938,597,572.65**	**713,210,187,182.00**	**43,271,589,609.35**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	92,788,382,000.00	94,865,147,000.00	2,076,765,000.00
2	Dinas Kesehatan	96,738,177,000.00	99,738,911,250.00	3,000,734,250.00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	184,904,013,000.00	199,498,482,350.00	14,594,469,350.00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	74,159,325,490.65	88,797,534,000.00	14,638,208,509.35
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12,742,719,000.00	12,982,419,000.00	239,700,000.00
6	Dinas Sosial	2,815,825,000.00	2,820,025,000.00	4,200,000.00
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1,521,023,000.00	1,528,223,000.00	7,200,000.00

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1,854,248,000.00	1,854,248,000.00	-
9	Dinas Ketahanan Pangan	1,957,105,000.00	1,961,605,000.00	4,500,000.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3,455,415,000.00	3,465,615,000.00	10,200,000.00
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3,157,880,000.00	3,280,680,000.00	122,800,000.00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4,329,290,000.00	4,333,790,000.00	4,500,000.00
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7,982,444,000.00	7,990,844,000.00	8,400,000.00
14	Dinas Perhubungan	2,758,505,250.00	3,072,474,250.00	313,969,000.00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7,119,767,000.00	8,059,347,000.00	939,580,000.00
16	Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	1,839,248,000.00	1,841,948,000.00	2,700,000.00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,946,512,000.00	2,119,012,000.00	172,500,000.00
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	2,279,105,000.00	2,283,305,000.00	4,200,000.00

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1,221,665,000.00	1,225,565,000.00	3,900,000.00
20	Dinas Perikanan	3,016,719,000.00	3,022,719,000.00	6,000,000.00
21	Dinas Pariwisata	6,300,069,000.00	6,307,269,000.00	7,200,000.00
22	Dinas Pertanian	14,290,514,000.00	15,298,299,500.00	1,007,785,500.00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9,857,100,132.00	9,871,200,132.00	14,100,000.00
24	**Sekretariat Daerah Kabupaten**	**50,884,429,900.00**	**52,180,657,900.00**	**1,296,228,000.00**
1	*Bag. Tata Pemerintahan*	*1,400,000,000.00*	*1,400,000,000.00*	-
2	*Bag. Pemerintahan Desa*	*1,507,270,000.00*	*1,577,798,000.00*	*70,528,000.00*
3	*Bag. Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan*	*9,739,865,000.00*	*9,739,865,000.00*	-
4	*Bag. Hukum*	*800,019,900.00*	*800,019,900.00*	-
5	*Bag. Bina Potensi Daerah*	*600,000,000.00*	*600,000,000.00*	-
6	*Bag. Pengembangan Administrasi Perekonomian Daerah*	*898,225,000.00*	*898,225,000.00*	-
7	*Bag. Administrasi Pembangunan*	*1,210,000,000.00*	*1,210,000,000.00*	-
8	*Bag. Barang Dan Jasa*	*480,000,000.00*	*480,000,000.00*	-

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
9	*Bag. Protokol*	*2,500,000,000.00*	*2,500,000,000.00*	-
10	*Bag. Umum*	*20,050,000,000.00*	*20,715,700,000.00*	*665,700,000.00*
11	*Bag. Perlengkapan*	*10,850,000,000.00*	*11,410,000,000.00*	*560,000,000.00*
12	*Bag. Organisasi*	*849,050,000.00*	*849,050,000.00*	-
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26,286,483,000.00	29,372,531,000.00	3,086,048,000.00
26	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	486,000,000.00	490,200,000.00	4,200,000.00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,260,330,800.00	15,325,430,800.00	65,100,000.00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,578,963,000.00	1,711,963,000.00	133,000,000.00
29	Kecamatan Gedong tataan	615,000,000.00	619,800,000.00	4,800,000.00
30	Kecamatan Negeri Katon	565,000,000.00	569,800,000.00	4,800,000.00
31	Kecamatan Tegineneng	577,000,000.00	582,100,000.00	5,100,000.00
32	Kecamatan Way Lima	493,000,000.00	496,000,000.00	3,000,000.00
33	Kecamatan Padang Cermin	420,000,000.00	420,900,000.00	900,000.00
34	Kecamatan Punduh Pidada	408,000,000.00	410,100,000.00	2,100,000.00
35	Kecamatan Kedondong	553,000,000.00	557,500,000.00	4,500,000.00
36	Kecamatan Marga Punduh	408,000,000.00	409,500,000.00	1,500,000.00

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
37	Kecamatan Way Khilau	480,000,000.00	483,300,000.00	3,300,000.00
38	Kecamatan Teluk Pandan	420,000,000.00	421,800,000.00	1,800,000.00
39	Kecamatan Way Ratai	382,000,000.00	382,900,000.00	900,000.00
40	Inspektorat	3,650,000,000.00	3,655,700,000.00	5,700,000.00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,650,000,000.00	5,078,082,000.00	428,082,000.00
42	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12,205,000,000.00	12,218,820,000.00	13,820,000.00
43	Badan Pendapatan Daerah	5,415,000,000.00	5,625,500,000.00	210,500,000.00
44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,582,522,000.00	4,393,622,000.00	811,100,000.00
45	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,583,818,000.00	1,585,318,000.00	1,500,000.00
JUMLAH		**669,938,597,572.65**	**713,210,187,182.00**	**43,271,589,609.35**

Tabel. V.3 Prioritas dan Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Kunkuren dan Perangkat Daerah Pelaksana Tahun 2018

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**479,728,292,300.65**	**514,166,469,410.00**	**34,438,177,109.35**
1.1	**Urusan Pendidikan**	**92,158,532,000.00**	**93,920,297,000.00**	**1,761,765,000.00**
	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	92,158,532,000	93,920,297,000	1,761,765,000
1.2	**Urusan Kesehatan**	**96,738,177,000.00**	**99,738,911,250.00**	**3,000,734,250.00**
	Dinas Kesehatan	96,738,177,000.00	99,738,911,250.00	3,000,734,250.00
1.3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**184,904,013,000.00**	**199,498,482,350.00**	**14,594,469,350.00**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184,904,013,000.00	199,498,482,350.00	14,594,469,350.00
1.4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**63,789,867,500.65**	**78,429,076,010.00**	**14,639,208,509.35**
	Dinas Perumahan Rakyat db Kawasan Permukiman	63,789,867,500.65	78,429,076,010.00	14,639,208,509.35
1.5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	**29,582,012,800.00**	**30,019,812,800.00**	**437,800,000.00**
	Satuan Polisi	12,742,719,000.00	12,982,419,000.00	239,700,000.00

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Pamong Praja			
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,260,330,800.00	15,325,430,800.00	65,100,000.00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,578,963,000.00	1,711,963,000.00	133,000,000.00
1.6	**Urusan Sosial**	**12,555,690,000.00**	**12,559,890,000.00**	**4,200,000.00**
	Dinas Sosial	2,815,825,000.00	2,820,025,000.00	4,200,000.00
	Sekretariat Daerah (Bagian Kesosmas)	9,739,865,000.00	9,739,865,000.00	-
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**58,511,425,240.00**	**60,691,874,240.00**	**2,180,449,000.00**
2.1	**Urusan Tenaga Kerja**	**1,079,293,000.00**	**1,086,493,000.00**	7,200,000.00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,079,293,000.00	1,086,493,000.00	7,200,000.00
2.2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**1,854,248,000.00**	**1,854,248,000.00**	**-**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,854,248,000.00	1,854,248,000.00	-
2.3	**Urusan Pangan**	**1,957,105,000.00**	**1,961,605,000.00**	**4,500,000.00**

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dinas Ketahanan Pangan	1,957,105,000.00	1,961,605,000.00	4,500,000.00
2.4	**Urusan Pertanahan**	**10,369,457,990.00**	**10,368,457,990.00**	**(1,000,000.00)**
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10,369,457,990.00	10,368,457,990.00	(1,000,000.00)
2.5	**Urusan Lingkungan Hidup**	**3,455,415,000.00**	**3,465,615,000.00**	**10,200,000.00**
	Dinas Lingkungan Hidup	3,455,415,000.00	3,465,615,000.00	10,200,000.00
2.6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**3,157,880,000.00**	**3,280,680,000.00**	**122,800,000.00**
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,157,880,000.00	3,280,680,000.00	122,800,000.00
2.7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**4,329,290,000.00**	**4,333,790,000.00**	**4,500,000.00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	4,329,290,000.00	4,333,790,000.00	4,500,000.00
2.8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**7,982,444,000.00**	**7,990,844,000.00**	**8,400,000.00**
	Dinas Pengendalian Penduduk &	7,982,444,000.00	7,990,844,000.00	8,400,000.00

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Keluarga Berencana			
2.9	**Urusan Perhubungan**	**2,758,505,250.00**	**3,072,474,250.00**	**313,969,000.00**
	Dinas Perhubungan	2,758,505,250.00	3,072,474,250.00	313,969,000.00
2.10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**	**5,154,367,000.00**	**6,098,947,000.00**	**944,580,000.00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,154,367,000.00	6,098,947,000.00	944,580,000.00
2.11	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**1,839,248,000.00**	**1,841,948,000.00**	**2,700,000.00**
	Dinas Koperasi dan UMKM	1,839,248,000.00	1,841,948,000.00	2,700,000.00
2.12	**Urusan Penanaman Modal**	**1,946,512,000.00**	**2,119,012,000.00**	**172,500,000.00**
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,946,512,000.00	2,119,012,000.00	172,500,000.00
2.13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**	**2,279,105,000.00**	**2,283,305,000.00**	**4,200,000.00**
	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,279,105,000.00	2,283,305,000.00	4,200,000.00
2.14	**Urusan Statistik**	**1,965,400,000.00**	**1,960,400,000.00**	**(5,000,000.00)**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,965,400,000.00	1,960,400,000.00	(5,000,000.00)
2.15	**Urusan Persandian**	**6,531,640,000.00**	**6,803,640,000.00**	**272,000,000.00**
	Sekretariat			

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Daerah	6,531,640,000.00	6,803,640,000.00	272,000,000.00
2.16	**Urusan Kebudayaan**	**629,850,000.00**	**944,850,000.00**	**315,000,000.00**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	629,850,000.00	944,850,000.00	315,000,000.00
2.17	**Urusan Perpustakaan**	**1,063,665,000.00**	**1,067,565,000.00**	**3,900,000.00**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,063,665,000.00	1,067,565,000.00	3,900,000.00
2.18	**Urusan Kearsipan**	**158,000,000.00**	**158,000,000.00**	**-**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	158,000,000.00	158,000,000.00	-
3	**URUSAN PILIHAN**	**33,906,132,132.00**	**34,941,217,632.00**	**1,035,085,500.00**
3.1.	**Urusan Perikanan dan Kelautan**	**3,016,719,000.00**	**3,022,719,000.00**	**6,000,000.00**
	Dinas Perikanan	3,016,719,000.00	3,022,719,000.00	6,000,000.00
3.2	**Urusan Pariwisata**	**6,300,069,000.00**	**6,307,269,000.00**	**7,200,000.00**
	Dinas Pariwisata	6,300,069,000.00	6,307,269,000.00	7,200,000.00
3.3	**Urusan Pertanian**	**14,290,514,000.00**	**15,298,299,500.00**	**1,007,785,500.00**
	Dinas Pertanian	14,290,514,000.00	15,298,299,500.00	1,007,785,500.00
3.4	**Urusan Perdagangan**	**7,176,700,132.00**	**7,264,754,132.00**	**88,054,000.00**
	Dinas Perindustrian & Perdagangan	7,176,700,132.00	7,264,754,132.00	88,054,000.00
3.5	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**	**361,730,000.00**	**361,730,000.00**	-

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	361,730,000.00	361,730,000.00	-
3.6	**Urusan Perindustrian**	**2,680,400,000.00**	**2,606,446,000.00**	**(73,954,000.00)**
	Dinas Perindustrian & Perdagangan	2,680,400,000.00	2,606,446,000.00	(73,954,000.00)
3.7	**Urusan Ketransmigrasian**	**80,000,000.00**	**80,000,000.00**	-
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,000,000.00	80,000,000.00	-
4	**URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**	**97,792,747,900.00**	**103,410,625,900.00**	**5,617,878,000.00**
4.1	**Perencanaan**	**4,650,000,000.00**	**5,078,082,000.00**	**428,082,000.00**
	BAPPEDA	4,650,000,000.00	5,078,082,000.00	428,082,000.00
4.2	**Keuangan**	**17,620,000,000.00**	**17,844,320,000.00**	**224,320,000.00**
	BPKAD	12,205,000,000.00	12,218,820,000.00	13,820,000.00
	BAPENDA	5,415,000,000.00	5,625,500,000.00	210,500,000.00
4.3	**Kepegawaian dan Diklat**	**3,582,522,000.00**	**4,393,622,000.00**	**811,100,000.00**
	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	3,582,522,000.00	4,393,622,000.00	811,100,000.00
4.4	**Penelitian dan Pengembangan**	**1,583,818,000.00**	**1,585,318,000.00**	**1,500,000.00**
	Badan Penelitian & Pengembangan	1,583,818,000.00	1,585,318,000.00	1,500,000.00

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.5	**Sekretariat DPRD**	**26,286,483,000.00**	**29,372,531,000.00**	**3,086,048,000.00**
	Sekretariat DPRD	*26,286,483,000.00*	29,372,531,000.00	3,086,048,000.00
4.6	**Administrasi Pemerintahan**	**40,419,924,900.00**	**41,481,052,900.00**	**1,061,128,000.00**
	Sekretariat Daerah	***34,612,924,900.00***	***35,637,152,900.00***	***1,024,228,000.00***
	Bagian Tata Pemerintahan	*550,000,000.00*	*550,000,000.00*	-
	Bagian Hukum	*800,019,900.00*	800,019,900.00	-
	Bagian Pemerintahan Desa	*1,507,270,000.00*	1,577,798,000.00	70,528,000.00
	Bagian Bina Potensi Daerah	*600,000,000.00*	600,000,000.00	-
	Bagian Pengembangan Administrasi Perekonomian Daerah	*898,225,000.00*	898,225,000.00	-
	Bagian Administrasi Pembangunan	*1,210,000,000.00*	1,210,000,000.00	-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	*480,000,000.00*	480,000,000.00	-
	Bagian Umum	*16,868,360,000.00*	*17,262,060,000.00*	*393,700,000.00*
	Bagian Perlengkapan	*10,850,000,000.00*	11,410,000,000.00	560,000,000.00
	Bagian Organisasi	849,050,000.00	849,050,000.00	-
	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	486,000,000.00	490,200,000.00	4,200,000.00
	Kecamatan Gedong Tataan	615,000,000.00	619,800,000.00	4,800,000.00

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kecamatan Negeri Katon	565,000,000.00	569,800,000.00	4,800,000.00
	Kecamatan Tegineneng	577,000,000.00	582,100,000.00	5,100,000.00
	Kecamatan Way Lima	493,000,000.00	496,000,000.00	3,000,000.00
	Kecamatan Paadang Cermin	420,000,000.00	420,900,000.00	900,000.00
	Kecamatan Punduh Pidada	408,000,000.00	410,100,000.00	2,100,000.00
	Kecamatan Kedondong	553,000,000.00	557,500,000.00	4,500,000.00
	Kecamatan Marga Punduh	408,000,000.00	409,500,000.00	1,500,000.00
	Kecamatan Way Khilau	480,000,000.00	483,300,000.00	3,300,000.00
	Kecamatan Teluk Pandan	420,000,000.00	421,800,000.00	1,800,000.00
	Kecamatan Way Ratai	382,000,000.00	382,900,000.00	900,000.00
4.7	**Pengawasan**	**3,650,000,000.00**	**3,655,700,000.00**	**5,700,000.00**
	Inspektorat	3,650,000,000.00	3,655,700,000.00	5,700,000.00
JUMLAH		**669,938,597,572.65**	**713,210,187,182.00**	**43,271,589,609.35**

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada **Tabel V.4** Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan daerah yang akan digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang substansinya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2018 memuat evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Pesawaran.

Namun demikian, kami menyadari Perubahan RKPD Tahun 2018 ini masih perlu koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan strategi kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah atasan, baik pada tingkat Provinsi Lampung maupun Pusat.

Demikian Perubahan RKPD ini disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018.

Gedong Tataan, Juli 2018

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.